



ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI RIAU TAHUN 2019

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU
PEKANBARU 2019

Executive Summary

Perkembangan PDRB Pengeluaran

Perekonomian Riau ditinjau dari sisi pengeluaran dalam perhitungan PDRB selama periode 2014-2018 cenderung mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstant. Nilai PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar 13,77 persen selama periode 2014-2018, yaitu dari Rp. 732,36 Triliun menjadi Rp. 833,18 Triliun. Sedangkan nilai PDRB pengeluaran atas dasar harga konstant mengalami peningkatan sebesar 9,68 persen, yaitu dari Rp. 488,08 Triliun menjadi Rp. 535,34 Triliun. Karakteristik perekonomian Riau menurut pengeluaran dibentuk oleh tiga komponen pengeluaran utama, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto dan ekspor luar negeri. Pada tahun 2014, proporsi ekspor luar negeri terhadap pembentukan nilai PDRB pengeluaran Riau berdasarkan harga berlaku sebesar 35,80 persen dan menurun menjadi 26,11 persen pada tahun 2018. Pergeseran kondisi perekonomian Riau terjadi menurut sumber pengeluaran menjadi didominasi oleh proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2018, dengan proporsi sebesar 32,76 persen pada tahun 2018 terhadap total PDRB pengeluaran atas dasar harga berlaku, dari sebelumnya 26,92 persen pada tahun 2014. Sedangkan menurut PDRB pengeluaran atas dasar konstant, karakteristik perekonomian Riau lebih dominan ditentukan oleh ekspor luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Riau sangat tergantung dengan faktor eksternal, yaitu perekonomian global.

Struktur Perekonomian menurut PDRB Pengeluaran

Secara umum struktur perekonomian Riau dari pembentukan PDRB menurut pengeluaran pada tahun 2018 atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstant didominasi oleh 3 (tiga) komponen pengeluaran, yaitu ekspor luar negeri, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto. Dengan kata lain, pembentuk perekonomian Riau dari sisi pengeluaran adalah ketiga komponen tersebut. Dari kondisi perekonomian tersebut dapat dipastikan bahwa perekonomian Riau sangat tergantung dengan kondisi pasar global.

Secara umum selama periode 2014-2018, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto memiliki kecenderungan yang terus meningkat dalam struktur perekonomian Riau dari sisi pengeluaran. Sedangkan perkembangan ekspor luar negeri mengalami fluktuasi sesuai dengan kondisi pasar global.

Berdasarkan dibawah ini, terlihat bahwa selama periode 2014-2018, produk yang dikonsumsi di wilayah domestic Provinsi Riau, antara 27-33 persen digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga. Peran ekspor yang semula sangat dominan pada perekonomian di Provinsi Riau perlahan mulai menurun, dari kontribusinya yang mencapai lebih dari 35 persen lebih pada 2014, turun hingga sekitar

26 persen pada tahun 2018. Sedangkan impor yang merupakan komponen pengurang, mempunyai peran yang relatif kecil dengan kontribusi sekitar 3-5 persen. Demikian arus perdagangan luar negeri di Provinsi Riau mengalami surplus selama periode 2014-2018.

Sektor Basis Provinsi Riau

Berdasarkan analisis LQ diperoleh bahwa sektor basis Provinsi Riau adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan. Ketiga sektor merupakan lapangan usaha penyumbang nilai PDRB terbesar terhadap total PDRB Riau selama periode 2014-2018. Perkembangan perekonomian Riau secara umum sangat ditentukan oleh perkembangan ketiga lapangan usaha tersebut.

Perekonomian Provinsi Riau di Pulau Sumatera dan Nasional

Secara absolut nilai PDRB Provinsi Riau menempati posisi terbesar pertama dalam perekonomian Sumatera. Provinsi Riau masih mendominasi kontribusi tertinggi dalam perekonomian Pulau Sumatera, yaitu sekitar 23,36 persen, dan berkontribusi sekitar 5,09 persen terhadap perekonomian Nasional. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Riau berdasarkan harga berlaku sebesar 2,34 persen dan lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi Sumatera sebesar 4,54 persen dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,17 persen.

Rekomendasi

Pengembangan sektor pertanian yang terintegrasi dengan sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan sektor jasa perlu menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan Riau

Pengembangan sektor yang memberikan daya saing yang lebih kompetitif di Riau dibandingkan dengan nasional perlu menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan ekonomi Riau, antara lain sektor pengadaan listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor jasa perusahaan, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan sektor jasa lainnya.

Sektor basis dapat menjadi acuan pada ketersediaan sumberdaya ekonomi secara lokal yang memerlukan dukungan kebijakan pemerintah daerah. Kebijakan pembangunan ekonomi dalam mendukung sektor basis pada setiap kabupaten di Provinsi Riau.

Pengembangan sumberdaya manusia dan tenaga kerja pada setiap daerah dan di Provinsi Riau secara umum harus menjadi perhatian dalam pembangunan ekonomi daerah. Hal ini dimaksudkan agar perkembangan ekonomi yang dihasilkan memberikan manfaat terhadap peningkatan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran di Provinsi Riau. Kebijakan bidang pendidikan dan ketenagakerjaan harus memiliki keterkaitan yang kuat dengan kebijakan pembangunan ekonomi di Provinsi Riau.



Kata Pengantar



Indikator Pembangunan daerah adalah salah satu ukuran cara dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah. Saat ini publikasi berisi informasi lengkap tentang perkembangan pembangunan daerah di Provinsi Riau masih relatif terbatas. Sehubungan dengan itu, dalam rangka melengkapi publikasi yang telah ada, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau menerbitkan Buku Analisis Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau.

Buku Analisis Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau tahun 2019 memberikan gambaran tentang perkembangan perekonomian daerah Provinsi Riau. Fokus dari publikasi ini adalah informasi mengenai struktur perekonomian daerah Provinsi Riau dan Perkembangan dalam lingkup Pulau Sumatra dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai rujukan utama.

Publikasi ini diharapkan dapat memperkaya referensi yang ada dan diperlukan dalam perencanaan pembangunan Provinsi Riau Khususnya dan daerah Kabupaten Kota, sehingga dapat meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan yang dihasilkan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan informasi ini. Kami menyadari bahwa publikasi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami senantiasa mengharapkan kritik, saran dan usulan perbaikan dari semua pihak/pembaca untuk penyempurnaannya.

Pekanbaru, November 2019
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Riau,



Ir. H. Yogi Getri

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	i
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Ruang Lingkup.....	4
1.4. Metode Analisis	4
BAB II Konsep dan Pengukuran PDRB.....	6
2.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	6
2.2. Pendekatan Perhitungan PDRB.....	8
2.2.1. Menurut Pendekatan Produksi	8
2.2.2. Menurut Pendekatan Pendapatan,	9
2.2.3. Menurut Pendekatan Pengeluaran,.....	9
2.3. PDRB Atas Dasar Harga Konstant (ADHK)	10
2.4. Klasifikasi PDRB menurut Pengeluaran.....	29
2.4.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.....	29
2.4.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani RT (LNPRT)..	30
2.4.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.....	31
2.4.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	31
2.4.5. Inventori.....	31
2.4.6. Ekspor - Impor	32
BAB III Tinjauan Perekonomian Riau Sisi Produksi	33
3.1. Perkembangan PDRB Riau	33
3.2. Struktur Ekonomi Provinsi Riau	36
3.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	40
BAB IV Perkembangan PDRB Menurut Pengeluaran	43
4.1. Perkembangan PDRB Pengeluaran.....	43
4.2. Struktu Perekonomian menurut PDRB Pengeluaran	47
4.3. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran.....	50

BAB V	Basis Perekonomian Riau	52
5.1.	Analisis Sektor Basis Perekonomian	52
5.2.	Sektor Basis Perekonomian Riau	55
5.3.	Analisis Shif-Share Perekonomian Riau	63
BAB VI	Perbandingan Perekonomian Indonesia dan Pulau Sumatera	66
6.1.	Perekonomian Indonesia	66
6.2.	Perekonomian Sumatera	68
6.3.	Distribusi Perekonomian Sumatera	69
6.4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera	70
BAB VII	Kesimpulan dan Rekomendasi	74
7.1.	Kesimpulan	74
7.2.	Rekomendasi	77
	Daftar Pustaka	74

Daftar Tabel

TABEL II-1	PERBANDINGAN PERUBAHAN KONSEP DAN METODE PERHITUNGAN PDRB	13
TABEL III-1	PERKEMBANGAN PDRB PROVINSI RIAU MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN HARGA KONSTANT (TRILIUN RUPIH) TAHUN 2014–2018	35
TABEL III-2	STRUKTUR PEREKONOMIAN PROVINSI RIAU MENURUT PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSEN) TAHUN 2014–2018	38
TABEL III-3	STRUKTUR PEREKONOMIAN PROVINSI RIAU MENURUT PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTANT MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSEN) TAHUN 2014–2018.....	39
TABEL III-4	LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA MENUSUT ATASA DASAR HARGA BERLAKU (ADHB) DAN ATASA DASAR HARGA KONSTANT (ADHK) (PERSEN) TAHUN 2014 – 2018	42
TABEL IV-1	PERKEMBANGAN PDRB PROVINSI RIAU ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT PENGELUARAN, TAHUN 2014-2018	45
TABEL IV-2	PERKEMBANGAN PDRB PROVINSI RIAU ATAS DASAR HARGA KONSTANT MENURUT PENGELUARAN, TAHUN 2014-2018	46
TABEL IV-3	DISTRIBUSI PDRB PROVINSI RIAU MENURUT PENGELUARAN, 2014-2018 ATAS DASAR HARGA BERLAKU (ADHB) DAN ATAS DASAR HARGA KONSTANT (ADHK) (PERSEN) TAHUN 2014-2018.....	49
TABEL IV-4	LAJU PERTUMBUHAN PDRB PROVINSI RIAU ATAS DASAR HARGA BERLAKU (ADHB) DAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN (ADHK) MENURUT PENGELUARAN (PERSEN) TAHUN 2014-2018	51
TABEL V-1	SEKTOR BASIS DALAM PEREKONOMIAN PROVINSI RIAU TAHUN 2014 – 2018.....	56
TABEL V-2	SEKTOR BASIS DALAM PEREKONOMIAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU TAHUN 2014 – 2018.....	58
TABEL V-3	ANALISIS KOEFISIEN LOCATION QUOTIENT (LQ) SEKTOR EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU TAHUN 2014-2018.....	61
TABEL V-4	ANALISIS SHIFT SHARE PEREKONOMIAN PROVINSI RIAU TAHUN 2014 – 2018.....	64
TABEL VI-1	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT PROVINSI (MILIAR RUPIAH), 2014-2018	69

Daftar Gambar

GAMBAR. III-1	PERKEMBANGAN PDRB PROVINSI RIAU MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU (ADHB) DAN ATAS DASAR HARGA KONSTANT (ADHK) TAHUN 2014-2018	33
GAMBAR. III-2	PERKEMBANGAN KONTRIBUSI LAPANGAN USAHA UTAMA DALAM PDRB PROVINSI RIAU ATAS DASAR HARGA BERLAKU (ADB) DAN ATAS DASAR HARGA KONSTANT (ADHK) TAHUN 2014-2018.....	36
GAMBAR. III-3	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI RIAU MENURUT LAPANGAN USAHA UTAMA ATAS DASAR HARGA BERLAKU (ADB) DAN ATAS DASAR HARGA KONSTANT (ADHK) TAHUN 2014-2018.....	40
GAMBAR. IV-1	PERKEMBANGAN PDRB PROVINSI RIAU MENURUT PENGELUARAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU (ADHB) DAN ATAS DASAR HARGA KONSTANT (ADHK) TAHUN 2014-2018..	43
GAMBAR. IV-2	STRUKTUR PDRB PROVINSI RIAU MENURUT PENGELUARAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU (ADHB) DAN ATAS DASAR HARGA KONSTANT (ADHK) TAHUN 2018.....	48
GAMBAR. VI-1	PERKEMBANGAN PDB INDONESIA ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2014 - 2018	67
GAMBAR. VI-2	PERKEMBANGAN PDB INDONESIA ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2014 - 2018	68
GAMBAR. VI-3	KONTRIBUSI PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU PULAU SUMATERA MENURUT PROVINSI TAHUN 2018 (PERSEN).....	70
GAMBAR. VI-4	LAJU PERTUMBUHAN EKOMI ATASA DASAR HARGA BERLAKU (ADHB) PROVINSI DI SUMATERA TAHUN 2018 (PERSEN)	71
GAMBAR. VI-5	PERBANDINGAN LAJU PERTUMBUHAN EKOMI ATAS DASAR HARGA BERLAKU (ADHB) ANTAR PROVINSI DI PULAU SUMATERA TAHUN 2014-2018 (PERSEN).....	72
GAMBAR. VI-6	PERBANDINGAN LAJU PERTUMBUHAN EKOMI ATAS DASAR HARGA KONSTANT (ADHK) ANTAR PROVINSI DI PULAU SUMATERA TAHUN 2014-2018 (PERSEN).....	73



BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi (*economic development*) adalah suatu proses untuk tujuan meningkatkan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Pembangunan ekonomi dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi dan juga diharapkan memberikan efek pada perbaikan aspek-aspek perekonomian lainnya, seperti kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adapun cara mengukur pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung di suatu negara tentunya memiliki tolak ukur tersendiri. Namun umumnya yang menjadi tolak ukur adalah *Gross Nasional Product* (GNP) dan *Gross Domestic Product* (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDRB). Kemudian untuk mengetahui perkembangan ekonomi di daerah dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi yang berlangsung di daerah dengan tolak ukur perkembangan *Gross Regional Domestic Product* (GRDP) atau dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah pendapatan yang diperoleh dari semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang digunakan berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. Pendapatan yang timbul disebabkan oleh adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik di daerah. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri. Demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah, termasuk dari dan ke luar negeri, yang secara umum berupa upah/gaji, bunga, deviden dan keuntungan menyebabkan terjadinya perbedaan antara produk domestik suatu negara dengan produk regional atau daerah.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat erat kaitannya dengan ketersediaan dan pemanfaatan sumber-sumber ekonomi dan non ekonomi di daerah. Faktor ekonomi yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat memengaruhi pertumbuhan industri suatu negara atau daerah, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi atau disebut sebagai proses produksi. Sumberdaya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional atau daerah melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk melakukan aktivitas produksi, memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada. Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan untuk mendukung kegiatan produksi. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan

kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Sementara itu, faktor nonekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, kelembagaan, dan sistem yang berkembang dan berlaku.

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat diartikan sebagai proses kenaikan produk per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi daerah tidak memperhatikan pemerataan pendapatan antar penduduk, tidak memperhatikan pertambahan penduduk di daerah, belum tentu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi pada aspek lain dan setiap input dapat menghasilkan output yang lebih banyak.

Berkaitan dengan itu, maka analisis ekonomi Riau menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka memahami trend pertumbuhan ekonomi Riau dan kaitannya dengan aspek-aspek lain dalam perekonomian daerah, termasuk dampaknya terhadap kondisi sosial masyarakat. Perekonomian daerah dicerminkan oleh produk domestik, sedangkan tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari sudut penggunaannya setelah diperhitungkan aliran pendapatan yang keluar masuk daerah tersebut.

1.2. Maksud dan Tujuan

Arah dan agenda perencanaan pembangunan Riau telah dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang dan jangka menengah daerah. Analisis terhadap pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah untuk mewujudkan Riau sebagai pusat perekonomian di Asis Tenggara, salah satunya dilihat dari hasil pembangunan ekonomi yang diukur dari perkembangan ekonomi daerah, yaitu trend dan kemajuan pertumbuhan ekonomi. Terarahnya pembangunan dan pengembangan wilayah secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan sebagai suatu kesatuan sosial, ekonomi, dan budaya dimungkinkan dengan memperhatikan berbagai macam potensi, karakteristik, dan daya dukung sumber daya daerah baik manusia maupun alam.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Analisis Pertumbuhan EKonomi Provinsi Riau Tahun 2019 ini adalah:

1. Menyediakan kompilasi data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau tahun 2014-2018,
2. Menganalisis struktur ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau menurut Lapangan Usaha dan menurut Pengeluaran tahun 2014-2018,
3. Membandingkan kinerja perekonomian Provinsi Riau dengan perekonomian Regional Sumatera.

1.3. Ruang Lingkup

Penyusunan Analisis Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2019 ini melingkupi cakupan waktu, wilayah dan materi analisis. Ruang lingkup waktu analisis perekonomian Riau adalah tahun 2014-2018, untuk ruang lingkup daerah Provinsi Riau. Sementara itu, ruang lingkup materi analisis meliputi analisis PDRB konstan dan berlaku, pertumbuhan ekonomi, PDRB, perubahan struktur ekonomi dan perbandingan capaian kinerja pertumbuhan ekonomi Riau dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

1.4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam kegiatan Penyusunan Analisis Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2019 ini adalah deskriptif dan menganalisis kondisi perekonomian Riau yang meliputi, perkembangan nilai PDRB, struktur perekonomian, laju pertumbuhan ekonomi, dan analisis spesialisasi sektor perekonomian dan analisis pergeseran relatif struktur perekonomian antar sektor-sektor perekonomian. Selain itu, dilakukan analisis hubungan antar pertumbuhan ekonomi dengan aspek-aspek kesejahteraan sosial yang meliputi kemiskinan, pengangguran dan analisis tingkat kesejahteraan penduduk.

Berkaitan dengan itu, maka penyajian Analisis Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2019 akan menggunakan analisis:

1. Analisis struktur perekonomian dengan menghitung kontribusi sektor-sektor perekonomian terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau selama periode 2014-2018,

2. Analisis laju pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dengan menganalisis perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau antar tahun selama periode 2014-2018,
3. Analisis spesialisasi sektor perekonomian dengan menghitung koefisien *Location Quotient (LQ)* untuk mengetahui sektor-sektor yang memiliki perkembangan yang lebih cepat dimasa mendatang,
4. Analisis pergeseran relatif struktur perekonomian dengan menghitung *Shift-Share* untuk mengetahui posisi relatif sektor-sektor ekonomi dan identifikasi sektor unggulan daerah dalam kaitannya dengan perekonomian nasional.
5. Menganalisis perbandingan tingkat perekonomian Provinsi Riau dengan provinsi lain dalam wilayah regional Sumatera,



BAB II Konsep dan Pengukuran PDRB

2.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian suatu negara selalu dimulai dari perekonomian daerah atau domestik. Domestik atau regional disini dapat merupakan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. Transaksi ekonomi yang dihitung merupakan transaksi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi tersebut dilakukan oleh masyarakat (residen) dari daerah itu sendiri atau dilakukan oleh masyarakat lain (non-residen) di daerah tersebut.

Produk domestik suatu daerah adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik tersebut tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut atau penduduk daerah lain. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Dari data yang ada menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, begitu juga dengan faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima oleh penduduk daerah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah ini (termasuk juga dari dan ke luar negeri) yang pada umumnya berupa upah/gaji, bunga, deviden dan keuntungan maka timbul perbedaan antara produk domestik dan produk regional.

Produk regional merupakan produk domestik ditambah dengan pendapatan dari faktor produksi yang diterima dari luar daerah/negeri dikurangi dengan

pendapatan dari faktor produksi yang dibayarkan ke luar daerah/negeri. Jadi produk regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh residen. Residen merupakan unit institusi yang mencakup penduduk/rumah tangga, perusahaan, pemerintah lembaga non-profit yang mempunyai atau melakukan kegiatan ekonomi di suatu wilayah (Indonesia). Suatu rumah tangga, perusahaan, lembaga non-profit tersebut mempunyai/melakukan kegiatan ekonomi di suatu wilayah jika memiliki tanah/bangunan atau melakukan kegiatan produksi di wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (minimal satu tahun).

Hal-hal yang harus diperhatikan tentang konsep residen dan non-residen suatu unit institusi adalah antara lain:

1. Penduduk suatu daerah adalah individu-individu atau anggota rumah tangga yang bertempat tinggal tetap di wilayah domestik daerah tersebut, kecuali:
 - a) Wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) daerah lain yang tinggal di wilayah domestik daerah tersebut kurang dari 1 tahun yang bertujuan untuk bertamasya atau berlibur, berobat, beribadah, kunjungan keluarga, pertandingan olahraga nasional/internasional dan konferensi-konferensi atau pertemuan lainnya, dan kunjungan dalam rangka belajar atau melakukan penelitian,
 - b) Awak kapal laut dan pesawat udara luar negeri/luar daerah yang kapalnya sedang masuk dok atau singgah di daerah tersebut,
 - c) Pengusaha asing dan pengusaha daerah lain yang berada di daerah tersebut kurang dari 1 tahun, pegawai perusahaan asing dan pegawai perusahaan daerah lainnya yang berada di wilayah domestik daerah tersebut kurang dari 1 tahun, misalnya untuk tujuan memasang jembatan atau peralatan yang dibeli dari mereka,
 - d) Pekerja musiman yang berada dan bekerja di wilayah domestik daerah tersebut, yang bertujuan sebagai pegawai musiman saja,
 - e) Anggota Korps Diplomatik, konsulat, yang ditempatkan di wilayah domestik daerah tersebut.

2. Organisasi internasional adalah bukan residen di wilayah dimana organisasi tersebut berada namun pegawai badan internasional/nasional tersebut adalah bukan penduduk daerah tersebut jika melakukan misi kurang dari 1 tahun.

Nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam melakukan penyusunan PDRB dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Penyusunan PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil). PDRB atas dasar harga berlaku atau PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian, sedangkan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi menggunakan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar.

2.2. Pendekatan Perhitungan PDRB

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

2.2.1. Menurut Pendekatan Produksi

Perhitungan PDRB dengan pendekatan produksi adalah perhitungan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan,
2. Pertambangan dan Penggalian,
3. Industri Pengolahan,
4. Pengadaan Listrik dan Gas,
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang,
6. Konstruksi,
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,

8. Transportasi dan Pergudangan,
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum,
10. Informasi dan Komunikasi,
11. Jasa Keuangan dan Asuransi,
12. Real Estate,
13. Jasa Perusahaan,
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib,
15. Jasa Pendidikan,
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial,
17. Jasa lainnya.

Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

2.2.2. Menurut Pendekatan Pendapatan,

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

2.2.3. Menurut Pendekatan Pengeluaran,

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:

1. Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga,
2. Pengeluaran konsumsi akhir lembaga non-profit yang melayani rumah tangga,
3. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah,
4. Pembentukan modal tetap domestik bruto,
5. Perubahan inventori,
6. Ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan perhitungan PDRB tersebut diatas akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan

jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. Hasil perhitungan PDRB yang dihasilkan dengan pendekatan ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, dimana di dalamnya mencakup pajak tak langsung neto.

2.3. PDRB Atas Dasar Harga Konstant (ADHK)

Dalam melakukan perhitungan PDRB mempergunakan tahun dasar untuk perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Selama sepuluh tahun terakhir telah banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional, diantaranya krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal. Hal-hal tersebut merupakan contoh perubahan yang harus diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional. Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur item tertentu seperti PDRB. SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan Kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami. Beberapa manfaat karena adanya perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

1. Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi.
2. Meningkatkan kualitas data PDRB.
3. Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara nasional maupun internasional.

Akibat adanya pergeseran harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:

1. Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian.
2. Mengubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, nilai neraca berjalan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi.
3. Menyebabkan perubahan pada input data untuk modelling dan forecasting (prakiraan kedepan).

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena berbagai pertimbangan sebagai berikut:

1. Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil.
2. Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama di bidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru.
3. Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun¹. (ISNA1993, para 16.76: *"constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"*)
4. Adanya pembaruan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data, dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008.

5. Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index/PPI*).
6. Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya dan 44 diantaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDRB tahun dasar 2010 diantaranya:

1. Konsep dan cakupan: Perlakuan pada *Cultivated Biological Resources (CBR)* Merupakan penyertaan pertumbuhan aset alam hasil budidaya manusia yang belum dipanen sebagai bagian dari output lapangan usaha yang bersangkutan seperti nilai sapi perah yang belum menghasilkan susu (laktasi) dan nilai pohon kelapa sawit atau karet yang belum berbuah/dipanen.
2. Metodologi: Perbaikan metode penghitungan output bank dari *Imputed Bank Services Charge (IBSC)* menjadi *Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM)*.
3. Valuasi: Nilai tambah lapangan usaha dinilai dengan Harga Dasar (Basic Price) Merupakan harga keekonomian barang dan jasa di tingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk. Valuasi ini hanya untuk penghitungan PDB, sedangkan PDRB menggunakan harga produsen.
4. Klasifikasi: Klasifikasi yang digunakan berdasarkan *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC rev.4)* dan *Central Product Classification (CPC rev.2)*. BPS mengadopsi kedua klasifikasi tersebut sebagai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009 (KBLI 2009) dan Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia 2010 (KBKI 2010).

Perbandingan perubahan konsep dan metode dari SNA sebelumnya dan SNA 2008 antara lain dijelaskan pada Tabel II-1 berikut.

Tabel II-1 Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB

No	Variabel	Konsep Lama	Konsep Baru
1.	Output pertanian	Hanya mencakup output pada saat panen	Output saat panen ditambah nilai hewan dan tumbuhan yang belum menghasilkan produk berulang
2.	Metode perhitungan output bank komersial	Menggunakan metode Imputed Bank Services Charge (IBSC)	Menggunakan metode Financial Intermediary Services Indirectly Measured (FISIM)
3.	Biaya eksplorasi mineral dan pembuatan produk original	Dicatat sebagai konsumsi antara	Dicatat sebagai output dan dikapitalisasi sebagai PMTB

Sumber: BPS, 2019

2.3. Klasifikasi PDRB menurut Lapangan Usaha

Klasifikasi PDRB akan berubah seiring dengan perubahan tahun dasar. Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990). Sedangkan PDRB dengan tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Klasifikasi PDRB menurut Lapangan Usaha telah diubah dari 9 (sembilan) lapangan usaha pada tahun dasar 2000 menjadi 17 lapangan usaha pada PDRB tahun dasar 2010. Lapangan usaha yang tercakup dalam PDRB dalam perhitungan PDRB tahun dasar 2010 dapat dijelaskan berikut ini.

A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala pengusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusahaan ini termasuk kegiatan yang

tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (*subsisten*) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.

A.1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

Subkategori ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual.

A.2. Kehutanan dan Penebangan Kayu

Subkategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

A.3. Perikanan

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, *crustacea*, *mollusca*, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

B. Pertambangan dan Penggalian

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat subkategori, yaitu pertambangan

minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam, serta pertambangan dan penggalian lainnya.

B.1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi

Subkategori pertambangan migas dan panas bumi meliputi kegiatan produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam serta pencarian cairan hidrokarbon. Subkategori ini juga mencakup kegiatan operasi dan/atau pengembangan lokasi penambangan minyak, gas alam, dan panas bumi.

B.2. Pertambangan Batubara dan Lignit

Pertambangan batubara mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batubara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous, baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan. Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batubara dari kumpulan tepung bara. Pertambangan lignit mencakup penambangan di permukaan tanah termasuk penambangan dengan metode pencairan dan kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pengangkutan dan penyimpanan.

B.3. Pertambangan Bijih Logam

Subkategori ini mencakup pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium, tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel, kobalt dan lain-lain, termasuk bijih logam mulia lainnya. Kelompok bijih logam mulia lainnya mencakup pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya. Beberapa jenis produknya antara lain pertambangan pasir besi dan bijih besi dan peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih besi, pertambangan dan pengolahan bijih

logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium (bauksit), tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel, kobalt dan lain-lain serta pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak dan logam mulia lainnya.

B.4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Subkategori ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian selain tersebut di atas. Termasuk dalam subkategori ini adalah komoditi garam hasil penggalian.

C. Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaruan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk Kategori Industri Pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklun atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

C.1. Industri Pengolahan Batubara, Pengilangan Minyak dan Gas Bumi

Subkategori ini mencakup kegiatan perubahan minyak, gas bumi dan batubara menjadi produk yang bermanfaat seperti pengilangan minyak dan gas bumi, yang meliputi pemisahan minyak bumi menjadi produk komponen melalui teknis seperti pemecahan dan penyulingan. Produk khas yang dihasilkan yaitu kokas, butane, propane, petrol, gas

hidrokarbon dan metan, gasoline, minyak tanah, gas etane, propane dan butane sebagai produk penyulingan minyak. Termasuk disini adalah pengoperasian tungku batubara, produksi batubara dan semi batubara, gas batubara, ter, lignit dan kokas.

C.2. Industri Makanan dan Minuman

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori, yaitu industri makanan dan industri minuman. Industri makanan mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan. Industri minuman mencakup pembuatan minuman beralkohol maupun tidak beralkohol, air minum mineral, bir dan anggur, dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan dan sayur-sayuran, minuman dengan bahan baku susu, serta pembuatan produk teh, kopi, dan produk teh dengan kadar kafein yang tinggi.

C.3. Industri Pengolahan Tembakau

Subkategori ini meliputi pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu, cangklong, snuff, chewing dan pemotongan serta pengeringan tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau. Beberapa produk yang dihasilkan rokok dan cerutu, tembakau pipa, tembakau sedot (snuff), rokok kretek, rokok putih dan lain-lain.

C.4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori yaitu industri tekstil dan industri pakaian jadi. Industri tekstil mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti: spre, taplak meja, gorden, selimut, permadani, tali temali, dan lain-lain). Industri pakaian jadi mencakup semua pekerjaan menjahit dari semua bahan dan semua jenis pakaian dan aksesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju anak-anak dan orang dewasa, atau pakaian tradisional dan modern. Subkategori ini juga mencakup

pembuatan industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu).

C.5. Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki

Subkategori ini mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi produk yang siap pakai, pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit, dan pembuatan alas kaki. Subkategori ini juga mencakup pembuatan produk sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil, dan lain-lain.

C.6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman

Subkategori ini mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, subkategori ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan. Contohnya pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso, papan, pengolahan rotan, kayu lapis, barang-barang bangunan dari kayu, kerajinan dari kayu, alat dapur dari kayu, rotan dan bambu. Subkategori ini tidak mencakup pembuatan mebel, atau perakitan/pemasangan perabot

C.7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekam

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori yaitu industri kertas dan barang dari kertas, dan industri pencetakan dan reproduksi media rekaman kayu dan sejenisnya.

C.8. Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional

Subkategori ini terdiri dari dua industri yaitu industri kimia dan industri farmasi dan obat tradisional. Industri kimia mencakup perubahan bahan organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk.

C.9. Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik

Subkategori ini mencakup pembuatan barang plastik dan karet dengan penggunaan bahan baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya.

C.10. Industri Barang Galian Bukan Logam

Kegiatan ini mencakup pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang berhubungan dengan unsur tunggal suatu mineral murni, seperti gelas dan produk gelas, produk keramik dan tanah liat bakar, semen dan plester. Industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya juga termasuk disini.

C.11. Industri Logam Dasar

Subkategori ini mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih, potongan atau bongkahan dengan menggunakan bermacam teknik metalurgi.

C.12. Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik

Subkategori ini mencakup pembuatan produk logam "murni" (seperti suku cadang, *container*/wadah dan struktur), pada umumnya mempunyai fungsi statis atau tidak bergerak, pembuatan perlengkapan senjata dan amunisi, pembuatan komputer, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang-barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya, pembuatan produk yang membangkitkan, mendistribusikan dan menggunakan tenaga listrik.

C.13. Industri Mesin dan Perlengkapan

Kegiatan yang tercakup dalam Subkategori Industri Mesin dan Perlengkapan adalah pembuatan mesin dan peralatan yang dapat bekerja bebas baik secara mekanik atau yang berhubungan dengan pengolahan bahan-bahan, termasuk komponen mekaniknya yang menghasilkan dan menggunakan tenaga dan komponen utama yang dihasilkan secara khusus. Subkategori ini juga mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus untuk angkutan penumpang atau barang dalam dasar pembatasan, peralatan tangan, peralatan tetap atau bergerak tanpa memperhatikan apakah peralatan tersebut dibuat untuk keperluan industri, pekerjaan sipil, dan bangunan, pertanian dan rumah tangga.

C.14. Industri Alat Angkutan

Subkategori ini mencakup Industri kendaraan bermotor dan semitrailer serta industri alat angkutan lainnya. Cakupan dari golongan ini adalah pembuatan kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang atau barang, alat angkutan lain seperti pembuatan kapal dan perahu, lori/gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat udara, dan pesawat angkasa. Golongan ini juga mencakup pembuatan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor, termasuk pembuatan trailer atau semitrailer.

C.15. Industri Furnitur

Industri furnitur mencakup pembuatan mebel dan produk yang berkaitan yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen, dan keramik. Pengolahan pembuatan mebel adalah metode standar, yaitu pembentukan bahan dan perakitan komponen, termasuk pemotongan, pencetakan, dan pelapisan. Perancangan produk baik untuk estetika dan kualitas fungsi adalah aspek yang penting dalam proses produksi. Pembuatan mebel cenderung menjadi kegiatan yang khusus.

C.16. Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

Subkategori ini mencakup pembuatan berbagai macam barang yang belum dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini. Subkategori ini merupakan gabungan dari industri pengolahan lainnya dan jasa reparasi serta pemasangan mesin dan peralatan. Subkategori ini bersifat residual, proses produksi, bahan input dan penggunaan barang-barang yang dihasilkan dapat berubah-ubah secara luas dan ukuran umum. Subkategori ini tidak mencakup pembersihan mesin industri, perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer dan komunikasi serta perbaikan dan pemeliharaan barang-barang rumah tangga. Tetapi mencakup perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatan khusus barang-barang yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk pemulihan mesin, peralatan dan produk lainnya.

D. Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen.

D.1. Ketenagalistrikan

Subkategori ini mencakup pembangkitan, pengiriman dan penyaluran tenaga listrik kepada konsumen, baik yang diselenggarakan oleh PT PLN maupun oleh perusahaan swasta (non PLN), seperti pembangkitan listrik oleh perusahaan milik Pemerintah Daerah dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan) dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan distribusi, dan listrik yang dicuri.

D.2. Pengadaan Gas dan Produksi Es

Subkategori ini menghasilkan gas alam, gas buatan, uap/air panas, udara dingin dan produksi es.

E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/ sampah padat atau bukan, baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini karena kegiatan ini seringkali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

F. Konstruksi

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

G.1. Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup semua kegiatan (kecuali industri dan penyewaan) yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori

dan truk, sebagaimana perdagangan besar dan eceran, perawatan dan pemeliharaan mobil dan motor baru maupun bekas. Termasuk perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesori mobil dan motor, juga mencakup kegiatan agen komisi yang terdapat dalam perdagangan besar dan eceran kendaraan.

G.2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran dan merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barangvdagangan selain produk mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar nasional dan internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi) juga merupakan cakupan dalam subkategori ini.

H. Transportasi dan Pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alatangkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

H.1. Angkutan Rel

Angkutan rel untuk penumpang dan atau barang yang menggunakan jalan rel kereta melalui antarkota, dalam kota, dan pengoperasian gerbong tidur atau gerbong makan kereta api yang sepenuhnya dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).

H.2. Angkutan Darat

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk pula kegiatan *charter*/sewa kendaraan baik dengan atau tanpa pengemudi; serta jasa angkutan dengan saluran pipa untuk mengangkut minyak mentah, gas alam, produk minyak, kimia dan air

H.3. Angkutan Laut

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam dan ke luar daerah domestik. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan oleh perusahaan lain yang berada dalam satu kesatuan usaha, di mana kegiatan pelayaran ini sifatnya hanya menunjang kegiatan induknya dan data yang tersedia sulit untuk dipisahkan.

H.4. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan pengangkutan penumpang, barang dan kendaraan dengan menggunakan kapal/angkutan sungai dan danau baik bermotor maupun tidak bermotor, serta kegiatan penyeberangan dengan alat angkut kapal ferry.

H.5. Angkutan Udara

Kegiatan ini meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di Indonesia.

H.6. Jasa Penunjang Angkutan, Pergudangan dan Pos dan Kurir

Mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu jasa-jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat (terminal dan parkir), jasa pelayanan bongkar muat barang darat dan laut, keagenan penumpang, jasa ekspedisi, jalan tol, pergudangan, jasa pengujian kelayakan angkutan darat dan laut, jasa penunjang lainnya, pos dan jasa kurir.

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

I.1. Penyediaan Akomodasi

Subkategori ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung atau pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja, dan sejenisnya (seperti asrama atau rumah kost dengan makan maupun tidak dengan makan).

I.2. Penyediaan Makan dan Minum

Kegiatan subkategori ini mencakup pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran *self service* atau restoran *take away*, baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

J. Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu penerbitan, produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik, penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi), telekomunikasi, pemrograman, serta konsultasi komputer dan teknologi informasi.

K. Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya, serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang aset, seperti kegiatan perusahaan *holding* dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

K.1. Jasa Perantara Keuangan

Kegiatan ini mencakup kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, seperti menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/pinjaman baik kredit jangka pendek/menengah dan panjang.

K.2. Asuransi dan Dana Pensiun

Asuransi dan dana pensiun mencakup penjaminan tunjangan hari tua serta polis asuransi, dimana premi tersebut diinvestasikan untuk digunakan terhadap klaim yang akan datang.

K.3. Jasa Keuangan Lainnya

Jasa keuangan lainnya meliputi mencakup kegiatan *leasing*, kegiatan pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak tercakup dalam perantara keuangan, serta kegiatan pendistribusian dana bukan dalam bentuk pinjaman. Subkategori ini mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pegadaian, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, modal ventura, anjak piutang, dan jasa keuangan lainnya.

K.4. Jasa Penunjang Keuangan

Jasa penunjang keuangan meliputi kegiatan yang menyediakan jasa yang berhubungan erat dengan aktivitas jasa keuangan, asuransi, dan dana pensiun. Subkategori ini mencakup kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek), manager investasi, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, wali amanat, jasa penukaran

mata uang, jasa broker asuransi dan reasuransi, dan kegiatan penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun lainnya.

L. Real Estat

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung, pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estat adalah properti berupa tanah dan bangunan.

M, N. Jasa Perusahaan

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

O. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan negara, keamanan dan keselamatan negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan

administrasi program pemerintah, serta jaminan sosial wajib. Kegiatan yang diklasifikasikan di kategori lain dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini meskipun dilakukan oleh badan pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistem sekolah, peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk kategori pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori Q.

P. Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup jasa rumah sakit; jasa klinik; jasa rumah sakit lainnya; praktek dokter; jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis; jasa pelayanan kesehatan tradisional; jasa pelayanan penunjang kesehatan; jasa angkutan khusus pengangkutan orang sakit (*medical evacuation*); jasa kesehatan hewan; jasa kegiatan sosial.

R, S, T, U. Jasa Lainnya

Kategori jasa lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi kesenian, hiburan, dan rekreasi; jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan; jasa swasta lainnya termasuk kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, badan regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

2.4. Klasifikasi PDRB menurut Pengeluaran

Klasifikasi PDRB menurut pengeluaran tahun dasar 2010 secara garis besar tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan dengan klasifikasi PDRB menurut tahun dasar 2000. Perubahan klasifikasi PDRB menurut pengeluaran antara tahun dasar 2000 dan tahun dasar 2010 dapat dijelaskan berikut ini.

2.4.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga atas barang dan jasa baik dengan cara membeli, menerima transfer, atau memproduksi sendiri dengan tujuan untuk dikonsumsi, dikurangi hasil penjualan neto barang bekas atau apkrkan pada periode waktu tertentu. Dalam hal ini rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir (*final demand*) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Menurut defenisi BPS, rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan (UN, 1993).

Barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga meliputi:

1. Makanan dan minuman, baik dalam bentuk bahan mentah maupun makanan jadi termasuk minuman beralkohol, tembakau, dan rokok,

2. Perumahan dan fasilitasnya, seperti biaya sewa atau kontrak rumah, bahan bakar, rekening telepon, listrik, dan air, biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah, termasuk imputasi sewa rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*),
3. Segala jenis bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki, dan penutup kepala,
4. Barang tahan lama seperti mobil, meubeler, perabot dapur, TV, perhiasan, alat olah raga, binatang peliharaan, tanaman hias,
5. Barang lain seperti bahan kebersihan (sabun mandi, sampo dsj.), bahan kecantikan (kosmetik, bedak, lipstik dsj.), obat-obatan, vitamin, buku, alat tulis, surat kabar, dan sebagainya,
6. Jasa-jasa seperti jasa kesehatan (biaya rumah sakit, dokter, imunisasi dsj.), jasa pendidikan (biaya sekolah, kursus dsj.), ongkos transportasi, perbaikan kendaraan, biaya hotel, tiket tempat rekreasi, biaya pembantu rumah tangga, barang yang diproduksi dan digunakan sendiri,
7. Pemberian/hadiah yang diterima dari pihak lain,
8. Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh penduduk di luar wilayah atau di luar negeri selain masuk sebagai konsumsi rumah tangga juga diperlakukan sebagai transaksi impor, sedangkan pembelian langsung oleh bukan penduduk di suatu wilayah diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah yang bersangkutan

2.4.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani RT (LNPRT)

Pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) adalah berbagai pengeluaran oleh lembaga untuk pengadaan barang dan jasa, yang secara prinsip bertujuan untuk dalam melayani rumah tangga. Pengeluaran konsumsi LNPRT digolongkan sebagai bagian dari pengeluaran konsumsi akhir yang ditujukan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan lembaga.

Lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) adalah satu entitas legal, yang secara prinsip terlibat dalam kegiatan layanan atau pemberian jasa kepada rumah tangga (*non-market*). Sebagian besar kegiatan lembaga

bersumber dari sumbangan atau donasi rumah tangga. Umumnya pekerja yang aktif dalam kegiatan lembaga merupakan tenaga kerja tidak dibayar (*volunteer*).

2.4.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah adalah nilai keseluruhan pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Pengeluaran konsumsi pemerintah terdiri dari pembelian barang dan jasa termasuk bantuan sosial (biaya antara), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai), dan penyusutan barang modal, dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa (output pasar) pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah (yang bukan dikonsumsi oleh pemerintah). Konsumsi pemerintah disebut juga dengan output non-pasar pemerintah.

2.4.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Secara garis besar PMTB didefinisikan sebagai pengeluaran unit produksi untuk menambah aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap bekas. Penambahan barang modal meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal). Pengurangan barang modal meliputi penjualan barang modal (termasuk barang modal yang ditransfer atau barter kepada pihak lain). Disebut sebagai pembentukan modal tetap bruto karena menggambarkan penambahan serta pengurangan barang modal pada periode tertentu. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun serta akan mengalami penyusutan. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa didalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan pada proses produksi secara normal selama satu periode.

2.4.5. Inventori

Inventori adalah persediaan yang dikuasai oleh unit yang menghasilkan untuk digunakan dalam proses lebih lanjut, dijual, atau diberikan pada pihak lain, atau digunakan dengan cara lain. Merupakan persediaan yang berasal dari

pihak lain, yang akan digunakan sebagai input antara atau dijual kembali tanpa mengalami proses lebih lanjut.

2.4.6. Ekspor - Impor

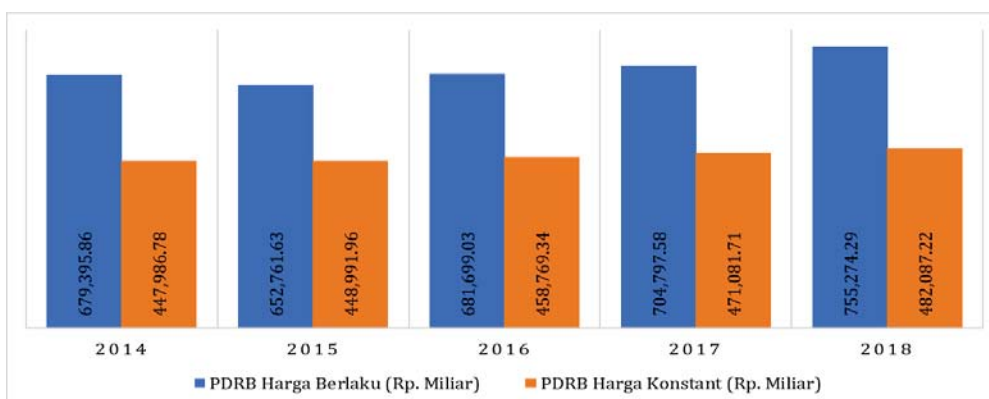
Secara umum, konsep ekspor-impor luar negeri yang digunakan dalam penyusunan PDB/PDRB Penggunaan mengacu pada *System of National Accounts (SNA) 1993*. Dalam SNA 1993, transaksi ekspor-impor barang luar negeri dalam komponen PDRB Penggunaan Provinsi merupakan salah satu bentuk transaksi internasional antara pelaku ekonomi yang merupakan residen suatu wilayah Provinsi terhadap pelaku ekonomi luar negeri (*non-resident*). Transaksi **ekspor barang** didefinisikan sebagai transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (baik berupa penjualan, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari residen suatu wilayah Provinsi terhadap pelaku ekonomi luar negeri (*non-resident*). Sebaliknya, **impor barang** didefinisikan sebagai transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (mencakup pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari pelaku ekonomi luar negeri (*non-resident*) terhadap residen suatu wilayah Provinsi.



BAB III Tinjauan Perekonomian Riau Sisi Produksi

3.1. Perkembangan PDRB Riau

Perekonomian Riau pada tahun 2015 merupakan titik terendah selama periode tahun 2014-2018. Hal ini seiring dengan kondisi perekonomian Indonesia dalam tahap *recovery* setelah mengalami perlambatan akibat krisis ekonomi dan ketidakpastian pada level internasional. Nilai PDRB Harga Berlaku Provinsi Riau pada tahun 2015 menurut lapangan usaha atau sisi produksi menurun menjadi Rp. 652,76 Triliun dari Rp. 679,39 Triliun pada tahun 2014 atau mengalami kontraksi sebesar 3,92 persen dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun 2014. Penurunan nilai PDRB Harga Berlaku pada tahun 2015 disebabkan oleh terjadi penurunan nilai produksi minyak dan gas di Provinsi Riau pada tahun 2015.



Gambar. III-1 Perkembangan PDRB Provinsi Riau menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan atas Dasar Harga Konstant (ADHK) Tahun 2014-2018

Perekonomian Provinsi Riau menurut nilai PDRB Harga Berlaku masih didominasi oleh perolehan nilai produksi pada lapangan usaha pertambangan, industri pengolahan dan pertanian. Ketiga lapangan usaha ini memberikan sumbangan sekitar 75 persen terhadap total nilai PDRB Riau pada tahun 2018. Kemudian jika diperhatikan 3 (tiga) lapangan usaha dengan nilai produksi paling kecil adalah lapangan usaha jasa perusahaan, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, pengadaan listrik dan gas. Dengan demikian, perekonomian Riau berdasarkan harga berlaku hingga saat ini masih didominasi oleh sektor primer yaitu pertambangan dan pertanian, serta didukung oleh sektor sekunder yaitu industri pengolahan.

Kondisi perekonomian Riau pada harga konstant tahun dasar 2010 juga menunjukkan bahwa nilai PDRB lapangan usaha pertambangan, industri pengolahan dan pertanian memberikan sumbangan nilai yang paling besar dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya. Ketiga lapangan usaha ini menjadi lapangan usaha yang dominan dalam memberikan perubahan terhadap nilai PDRB Provinsi Riau. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Riau ditopang oleh ketiga lapangan usaha tersebut. Nilai PDRB Riau berdasarkan harga konstan tahun 2010, menunjukkan bahwa sekitar 75 persen diperoleh dari lapangan usahan pertambangan, industri pengolahan dan pertanian, sedangkan 25 persen lagi diperoleh dari 14 lapangan usaha lainnya.

Secara rinci perkembangan nilai produksi 17 lapangan usaha pada PDRB Riau berdasarkan harga berlaku dan harga konstant tahun 2010 selama periode tahun 2014 – 2018 disajikan berikut ini.

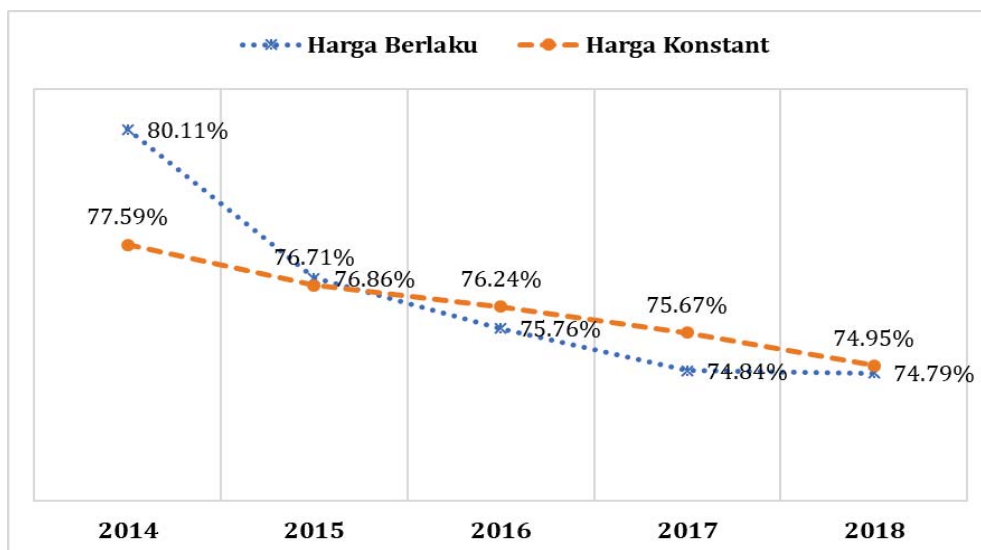
**Tabel III-1 Perkembangan PDRB Provinsi Riau Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstant (Triliun Rupih) Tahun
2014–2018**

No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Triliun Rupiah)									
		2014		2015		2016		2017		2018	
		HDHB	HDHK	HDHB	HDHK	HDHB	HDHK	HDHB	HDHK	HDHB	HDHK
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	133.55	108.50	1,442.19	108.97	156.23	113.29	165.93	119.27	169.49	124.48
B.	Pertambangan dan Penggalian	268.82	116.66	2,017.97	108.55	191.97	103.96	182.69	97.35	210.11	92.01
C.	Industri Pengolahan	141.87	122.44	1,556.86	126.88	168.24	132.53	178.83	139.84	185.24	144.81
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0.23	0.22	3.11	0.24	0.40	0.27	0.44	0.28	0.47	0.29
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.07	0.06	0.72	0.06	0.08	0.06	0.08	0.07	0.08	0.07
F.	Konstruksi	45.44	32.37	516.73	34.44	57.00	36.14	61.70	38.28	66.92	40.37
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	52.87	38.25	579.53	38.82	63.96	40.71	69.03	43.30	74.07	46.09
H.	Transportasi dan Pergudangan	4.46	3.58	51.85	3.77	5.64	3.89	6.04	4.06	6.43	4.19
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.16	1.99	33.42	2.02	3.61	2.09	3.82	2.18	4.06	2.28
J.	Informasi dan Komunikasi	3.54	3.45	40.77	3.70	4.37	3.88	4.75	4.09	5.11	4.32
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.43	4.23	56.65	4.24	6.14	4.48	6.25	4.38	6.79	4.58
L.	Real Estate	4.66	3.72	54.05	4.03	5.79	4.09	6.09	4.22	6.40	4.38
M,N.	Jasa Perusahaan	0.03	0.02	0.32	0.02	0.03	0.02	0.04	0.03	0.04	0.03
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	9.25	7.88	100.77	8.23	10.39	8.20	10.67	8.28	10.94	8.36
P.	Jasa Pendidikan	2.76	2.04	32.67	2.17	3.46	2.18	3.65	2.27	3.87	2.38
Q.	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0.96	0.75	11.76	0.82	1.22	0.82	1.31	0.87	1.42	0.92
R,S,T, U	Jasa lainnya	2.31	1.84	28.24	2.02	3.16	2.15	3.48	2.32	3.85	2.52
Jumlah		679.40	447.99	6,527.62	448.99	681.70	458.77	704.80	471.08	755.27	482.09

3.2. Struktur Ekonomi Provinsi Riau

Struktur ekonomi Riau didominasi oleh tiga lapangan usaha, yaitu lapangan usaha pertambangan dan penggalian, lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Kontribusi ketiga lapangan usaha utama tersebut dalam struktur perekonomian Riau semakin menurun selama periode tahun 2014 – 2018. Pada tahun 2014, sumbangan ketiga sektor utama tersebut sebesar 80,11 persen terhadap PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Riau, dan kemudian menurun menjadi 74,79 persen pada tahun 2018. Hal yang sama juga terjadi dalam PDRB atas dasar harga konstant Provinsi Riau, dimana pada tahun 2014 kontribusi ketiga lapangan usaha utama tersebut sebesar 77,59 persen terhadap total PDRB Riau atas dasar harga konstant, dan kemudian menjadi 74,95 persen pada tahun 2018.

Meskipun memberikan kontribusi yang semakin menurun terhadap PDRB Riau, ketiga lapangan usaha tersebut masih merupakan sektor andalan pembentuk struktur perekonomian Riau. Dengan kata lain, bahwa perkembangan perekonomian Riau selama periode 2014-2018 sangat tergantung terhadap perkembangan ketiga lapangan usaha tersebut.



Gambar. III-2 Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha Utama dalam PDRB Provinsi Riau atas Dasar Harga Berlaku (ADB) dan atas Dasar Harga Konstant (ADHK) Tahun 2014-2018

Ketiga lapangan usaha tersebut memberikan perkembangan kontribusi yang berbeda terhadap perekonomian Riau. Lapangan usaha pertambangan memiliki sumbangan dengan perkembangan yang semakin menurun terhadap perekonomian Riau. Pada tahun 2014 kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian Riau sebesar 26,04 persen pada PDRB atas dasar harga berlaku dan kemudian memberikan kontribusi yang menurun menjadi 19,09 persen terhadap total PDRB Riau. Hal yang berbeda terjadi pada lapangan usaha pertanian dan lapangan usaha industri pengolahan, dimana pada tahun 2014 kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Riau sebesar 24,22 persen terhadap total PDRB atas dasar berlaku dan kemudian memberikan kontribusi yang semakin besar, yaitu 25,82 persen terhadap total PDRB. Sedangkan lapangan usaha industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 27,33 persen terhadap total PDRB harga berlaku tahun 2014 dan meningkat menjadi 30,04 persen pada tahun 2018. Perkembangan kontribusi ketiga lapangan usaha ini terhadap struktur perekonomian Riau mengindikasikan bahwa sektor pertambangan semakin menurun perannya terhadap peningkatan PDRB Riau, sedangkan sektor pertanian dan industri pengolahan semakin besar perannya terhadap struktur perekonomian Riau. Dengan kata lain, telah terjadi proses *switching sectoral* dalam pembentukan struktur perekonomian Riau dari sektor pertambangan kepada sektor industri pengolahan dan sektor pertanian selama periode 2014-2018.

Lapangan usaha lain yang memberikan kontribusi penting dalam struktur perekonomian Riau adalah lapangan usaha perdagangan yang meliputi perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan lapangan usaha konstruksi. Lapangan usaha perdagangan memberikan kontribusi sebesar 8,54 persen terhadap struktur perekonomian Riau atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 dan kemudian meningkat menjadi sebesar 9,56 persen terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2018. Sedangkan lapangan konstruksi memberikan kontribusi sebesar 7,23 persen terhadap total PDRB atas harga berlaku tahun 2014 dan kemudian meningkat menjadi 8,37 persen pada tahun 2018. Kemudian, pada perekonomian dengan harga konstant tahun 2010, kontribusi sektor perdagangan dalam pembentukan struktur perekonomian Riau sebesar 7,78 persen pada tahun 2014 dan kemudian meningkat menjadi 9,81 persen pada tahun 2018. Sedangkan lapangan usaha konstruksi memberikan kontribusi yang meningkat dari 6,69

persen pada tahun 2014 menjadi 8,86 persen pada tahun 2018 terhadap PDRB harga konstant tahun 2010.

Tabel III-2 Struktur Perekonomian Provinsi Riau menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2014–2018

No.	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19,66	22,09	22,92	23,54	22,44
B.	Pertambangan dan Penggalian	39,57	30,91	28,16	25,92	27,82
C.	Industri Pengolahan	20,88	23,85	24,68	25,37	24,53
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,05	0,06	0,06	0,06
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F.	Konstruksi	6,69	7,92	8,36	8,75	8,86
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,78	8,88	9,38	9,79	9,81
H.	Transportasi dan Pergudangan	0,66	0,79	0,83	0,86	0,85
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,47	0,51	0,53	0,54	0,54
J.	Informasi dan Komunikasi	0,52	0,62	0,64	0,67	0,68
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,80	0,87	0,90	0,89	0,90
L.	Real Estate	0,69	0,83	0,85	0,86	0,85
M, N.	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,36	1,54	1,52	1,51	1,45
P.	Jasa Pendidikan	0,41	0,50	0,51	0,52	0,51
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,14	0,18	0,18	0,19	0,19
R,S,T,U.	Jasa lainnya	0,34	0,43	0,46	0,49	0,51
Jumlah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, 2019

Beberapa lapangan usaha yang masih memberikan kontribusi kecil dalam struktur perekonomian Riau adalah lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, lapangan usaha pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, dan lapangan usaha jasa perusahaan. Kontribusi lapangan usaha ini sangat kecil, namun menunjukkan peningkatan atau mengalami ekspansi selamanya periode 2014-2018. Seiring dengan perkembangan perekonomian Riau, maka

sektor-sektor pendukung pada lapangan usaha utama menjadi penting dalam perkembangan struktur perekonomian Riau dimasa mendatang. Perkembangan sektor tersier, khususnya lapangan usaha jasa dan lapangan usaha keuangan menjadi sektor penting dimasa mendatang dengan perkembangan yang cukup baik selama periode 2014-2018.

Tabel III-3 Struktur Perekonomian Provinsi Riau menurut PDRB Atas Dasar Harga Konstant menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2014–2018

No.	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,22	24,27	24,69	25,32	25,82
B.	Pertambangan dan Penggalian	26,04	24,18	22,66	20,66	19,09
C.	Industri Pengolahan	27,33	28,26	28,89	29,68	30,04
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F.	Konstruksi	7,23	7,67	7,88	8,13	8,37
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,54	8,65	8,87	9,19	9,56
H.	Transportasi dan Pergudangan	0,80	0,84	0,85	0,86	0,87
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,44	0,45	0,45	0,46	0,47
J.	Informasi dan Komunikasi	0,77	0,82	0,85	0,87	0,90
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,94	0,94	0,98	0,93	0,95
L.	Real Estate	0,83	0,90	0,89	0,90	0,91
M,N.	Jasa Perusahaan	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,76	1,83	1,79	1,76	1,73
P.	Jasa Pendidikan	0,46	0,48	0,48	0,48	0,49
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19
R,S,T,U.	Jasa lainnya	0,41	0,45	0,47	0,49	0,52
Jumlah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

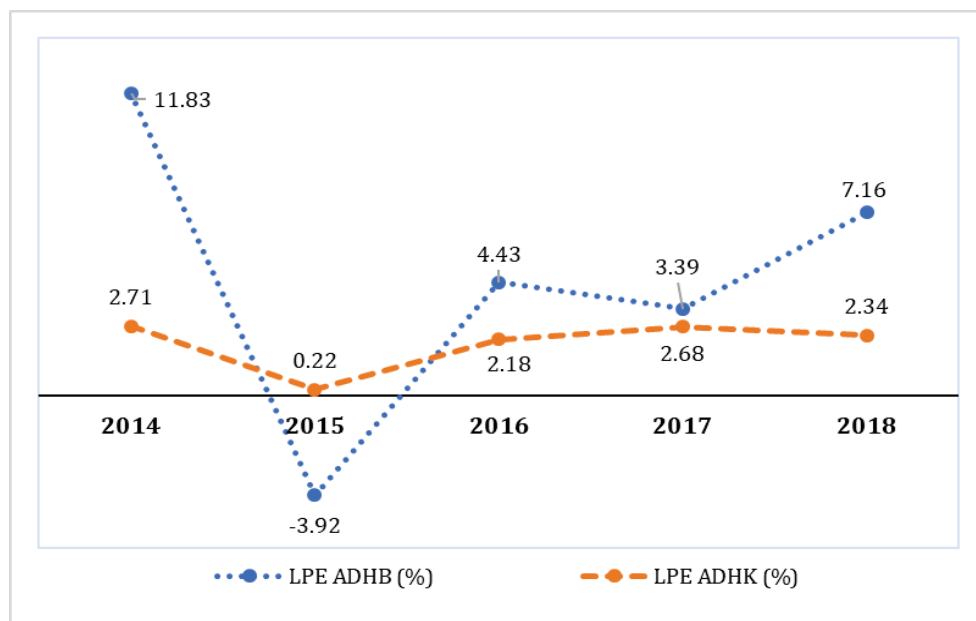
Sumber: BPS, 2019

Lapangan usaha yang menunjukkan perkembangan yang cukup baik, walaupun kontribusinya masih cukup kecil terhadap struktur perekonomian Riau adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib,

lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi, dan lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Seiring dengan perkembangan perekonomian Riau, maka selain sektor pemerintah, sektor jasa keuangan dan sektor transportasi dan pergudangan semakin penting dalam perekonomian Riau selama periode 2014-2018.

3.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum laju pertumbuhan ekonomi Riau selama periode tahun 2014 - 2018 menunjukkan hal yang berbeda menurut harga berlaku dan harga konstant. Laju pertumbuhan ekonomi menurut harga berlaku selama periode tahun 2014 -2018 menunjukkan trend yang menurun dari 11,83 persen pada tahun 2014 menjadi 7,16 persen pada tahun 2018. Laju pertumbuhan ekonomi terburuk terjadi pada tahun 2015 dengan laju pertumbuhan ekonomi 3,92 persen dibawah nol atau mengalami pertumbuhan negatif.



Gambar. III-3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Menurut Lapangan Usaha Utama atas Dasar Harga Berlaku (ADB) dan atas Dasar Harga Konstant (ADHK) Tahun 2014-2018

Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstant selama periode 2014-2018 masih berada pada pertumbuhan yang positif, walaupun

masih mengalami fluktuasi. Kecenderungan laju pertumbuhan ekonomi Riau berdasarkan harga konstant adalah meningkat, Laju pertumbuhan ekonomi terendah berdasarkan atas dasar konstant terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 0,22 persen, dan kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 2,18 persen dan terus meningkat menjadi 2,68 persen pada tahun 2017 dan sedikit mengalami penurunan menjadi 2,34 persen pada tahun 2018.

Berdasarkan penelusuran laju pertumbuhan ekonomi dalam struktur perekonomian, terlihat bahwa laju pertumbuhan pada sektor pertambangan mengalami kontraksi yang cukup jauh dibawah nol atau dengan pertumbuhan yang negatif hingga minus 24,93 persen pada tahun 2015 menurut harga berlaku dan sebesar 6,95 persen berdasar harga konstant. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan laju perkembangan nilai produksi pada sektor pertambangan akan memberikan pengaruh besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi Riau. Walaupun demikian, laju pertumbuhan ekonomi pada sektor pertambangan mengalami perbaikan pada tahun 2016– 2018. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan atas dasar harga konstant adalah negatif selama periode tahun 2014 – 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan nilai produksi sektor pertambangan telah mengalami penurunan atas dasar harga konstant.

Lapangan usaha yang dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam struktur perekonomian Riau selama periode 2014-2018 adalah sektor jasa perusahaan, dengan laju pertumbuhan pada tahun 2014 sebesar 8,19 persen pada tahun 2018 berdasarkan harga konstant. Namun, laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar 5,24 persen. Beberapa sektor justru mengalami pertumbuhan lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Riau atas dasar harga konstant pada tahun 2014, yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 1,06 persen, dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 1,53 persen. Pada tahun 2015, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Riau atas dasar harga konstant sebesar 0,22 persen dan menurun dari 2,71 persen pada tahun 2014. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi Riau pada tahun 2015 disebabkan oleh laju pertumbuhan sektor pertambangan yang berada 6,95 persen dibawah nol atau mengalami pertumbuhan negatif, sedangkan sektor-sektor lain masih mengalami pertumbuhan yang positif.

**Tabel III-4 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha menurut
Atasa Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstant (ADHK)
(persen) Tahun 2014 – 2018**

No	Lapangan Usaha	2014		2015		2016		2017		2018	
		HDHB	ADHK	HDHB	ADHK	HDHB	ADHK	HDHB	ADHK	HDHB	ADHK
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,68	6,15	7,99	0,43	8,33	3,96	6,21	5,28	2,14	4,37
B.	Pertambangan dan Penggalian	4,85	-5,24	-24,93	-6,95	-4,87	-4,23	-4,84	-6,36	15,01	-5,48
C.	Industri Pengolahan	13,61	5,63	9,73	3,63	8,06	4,45	6,29	5,52	3,59	3,56
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	27,73	9,40	34,89	9,70	27,47	13,52	11,99	1,37	5,74	3,70
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,77	1,06	9,53	2,40	4,86	-0,43	7,13	4,74	0,05	-0,23
F.	Konstruksi	18,74	8,46	13,72	6,39	10,31	4,92	8,24	5,92	8,47	5,46
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	31,22	3,96	9,62	1,49	10,36	4,88	7,94	6,37	7,29	6,44
H.	Transportasi dan Pergudangan	18,54	7,99	16,32	5,38	8,77	3,06	7,08	4,33	6,46	3,27
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	34,26	6,97	5,65	1,89	8,01	3,17	5,71	4,40	6,39	4,67
J.	Informasi dan Komunikasi	12,41	5,64	15,20	7,15	7,21	4,95	8,74	5,43	7,42	5,60
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,25	4,93	4,32	0,35	8,41	5,65	1,84	-2,24	8,57	4,64
L.	Real Estate	14,82	5,32	16,02	8,34	7,14	1,52	5,08	3,32	5,11	3,63
M,N.	Jasa Perusahaan	21,43	12,83	13,54	7,70	6,88	2,64	10,20	7,92	9,97	8,19
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,35	1,53	8,98	4,39	3,14	-0,30	2,62	0,97	2,57	0,98
P.	Jasa Pendidikan	21,50	5,90	18,37	6,35	5,88	0,68	5,45	3,75	6,12	4,83
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	21,27	8,40	23,12	9,94	4,10	0,56	7,40	5,82	7,84	5,57
R,S,T,U.	Jasa lainnya	23,39	11,14	22,34	10,14	11,89	6,35	10,14	7,91	10,59	8,67
	Jumlah	11,83	2,71	-3,92	0,22	4,43	2,18	3,39	2,68	7,16	2,34

Sumber: BPS, 2019

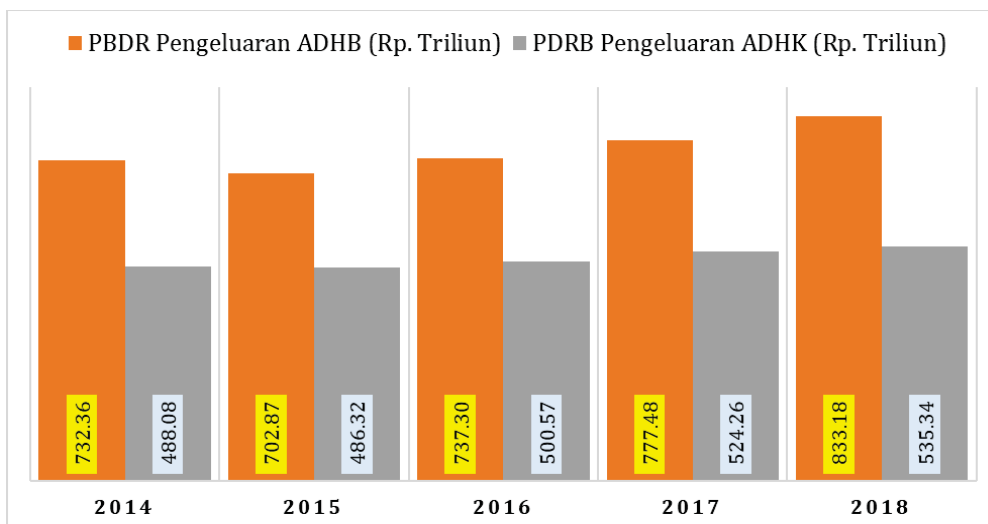
Pada tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi Riau berdasarkan harga konstant sebesar 2,34 persen dan sedikit menurun dari 2,68 persen pada tahun 2017. Laju pertumbuhan ekonomi terbesar ditemukan pada sektor jasa lainnya yaitu sebesar 8,67 persen dan 8,19 persen pada sektor jasa perusahaan. Sektor pertambangan dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang justru mengalami pertumbuhan yang negatif, yaitu masing-masing sebesar 5,48 persen dan 0,23 persen.



BAB IV Perkembangan PDRB Menurut Pengeluaran

4.1. Perkembangan PDRB Pengeluaran

Perekonomian Riau ditinjau dari sisi pengeluaran dalam perhitungan PDRB selama periode 2014-2018 cenderung mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstant. Nilai PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar 13,77 persen selama periode 2014-2018, yaitu dari Rp. 732,36 Triliun menjadi 833,18 Triliun. Sedangkan nilai PDRB pengeluaran atas dasar harga konstant mengalami peningkatan sebesar 9,68 persen, yaitu dari Rp. 488,08 Triliun menjadi Rp. 535,34 Triliun.



Gambar. IV-1 Perkembangan PDRB Provinsi Riau menurut Pengeluaran atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan atas Dasar Harga Konstant (ADHK) Tahun 2014-2018

Karakteristik perekonomian Riau menurut pengeluaran dibentuk oleh tiga komponen pengeluaran utama, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto dan ekspor luar negeri. Pada tahun 2014, karakteristik perekonomian Riau menurut pengeluaran dicirikan oleh perekonomian yang sangat tergantung dengan pasar dunia. Hal ini ditunjukkan bahwa pembentuk perekonomian Riau menurut pengeluaran lebih besar ditentukan oleh kegiatan perdagangan dunia, yaitu ekspor dan impor. Pada tahun 2014, proporsi ekspor luar negeri terhadap pembentukan nilai PDRB pengeluaran Riau berdasarkan harga berlaku sebesar 35,80 persen dan menurun menjadi 26,11 persen pada tahun 2018. Pergeseran kondisi perekonomian Riau terjadi menurut sumber pengeluaran menjadi didominasi oleh proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2018, dengan proporsi sebesar 32,76 persen pada tahun 2018 terhadap total PDRB pengeluaran atas dasar harga berlaku, dari sebelumnya 26,92 persen pada tahun 2014. Sedangkan menurut PDRB pengeluaran atas dasar konstant, karakteristik perekonomian Riau lebih dominan ditentukan oleh ekspor luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Riau sangat tergantung dengan factor eksternal, yaitu perekonomian global.

Faktor eksternal menjadi penyebab terjadinya perubahan struktur ekonomi Provinsi Riau. Hal ini berdampak dari proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode tahun 2014 - 2018. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir, sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat transaksi perdagangan internasional. Struktur PDRB Riau menurut pengeluaran menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Provinsi Riau digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga/LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB dan perubahan inventori).

Kondisi perekonomian Riau menunjukkan kemajuan atau perkembangan yang baik pada selama periode 2014 - 2018. Hal ini terlihat dari total nilai PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan

arah positif. Namun diantara tahun 2014 – 2018 terjadi penurunan besaran PDRB Provinsi Riau pada tahun 2015, hal ini sebagai dampak dari ketidakpastian perekonomian nasional dan global. Fenomena ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), serta pertumbuhan pada total PDRB.

Tabel IV-1 Perkembangan PDRB Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, tahun 2014-2018

No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Triliun Rupiah)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	197.16	222.17	241.26	259.00	272.94
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.73	2.91	3.12	3.42	3.86
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	20.56	23.46	25.55	26.76	27.66
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	173.22	198.06	221.47	238.51	258.50
5	Perubahan Inventori	30.13	7.37	11.84	5.06	6.63
6	Ekspor Luar Negeri	262.16	212.03	178.28	210.78	217.55
7	Impor Luar Negeri	26.48	25.06	27.80	36.34	38.95
8	Net Ekspor Antar Daerah	19.91	11.81	27.98	(2.39)	7.09
Jumlah		732.36	702.87	737.30	777.48	833.18

Sumber: BPS, 2019

Nilai PDRB Riau (ADHB) selama periode tahun 2014-2018 menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahun, kecuali pada tahun 2015, besaran nilai PDRB mengalami penurunan. Peningkatan maupun penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Dari sisi *demand*, pada tahun 2018 seluruh komponen mengalami peningkatan. Peningkatan nilai PDRB Riau menurut pengeluaran pada setiap tahun selama periode 2014-2018 menunjukkan adanya permintaan yang meningkat di Provinsi Riau, baik yang dilakukan oleh sektor rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan hidup, pemenuhan kebutuhan swasta untuk investasi dan modal kerja, maupun pemenuhan kebutuhan pemerintah dalam pembangunan. Besaran nilai PDRB pada setiap komponen pengeluaran menunjukkan telah terjadi pergerakan ekonomi yang meningkat di Provinsi Riau selama periode 2014-2018.

Tabel IV-2 Perkembangan PDRB Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstant Menurut Pengeluaran, tahun 2014-2018

No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Triliun Rupiah)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	140.48	148.86	156.86	164.00	169.43
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.03	2.03	2.09	2.18	2.38
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	17.80	18.42	18.38	18.51	18.59
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	129.64	134.85	139.71	144.91	151.79
5	Perubahan Inventori	11.20	3.66	4.20	2.96	2.44
6	Ekspor Luar Negeri	208.79	185.19	161.77	169.96	169.47
7	Impor Luar Negeri	20.05	18.66	20.90	26.59	26.63
8	Net Ekspor Antar Daerah	(41.89)	(25.36)	(3.33)	(4.85)	(5.39)
Jumlah		488.08	486.32	500.57	524.26	535.34

Sumber: BPS, 2019

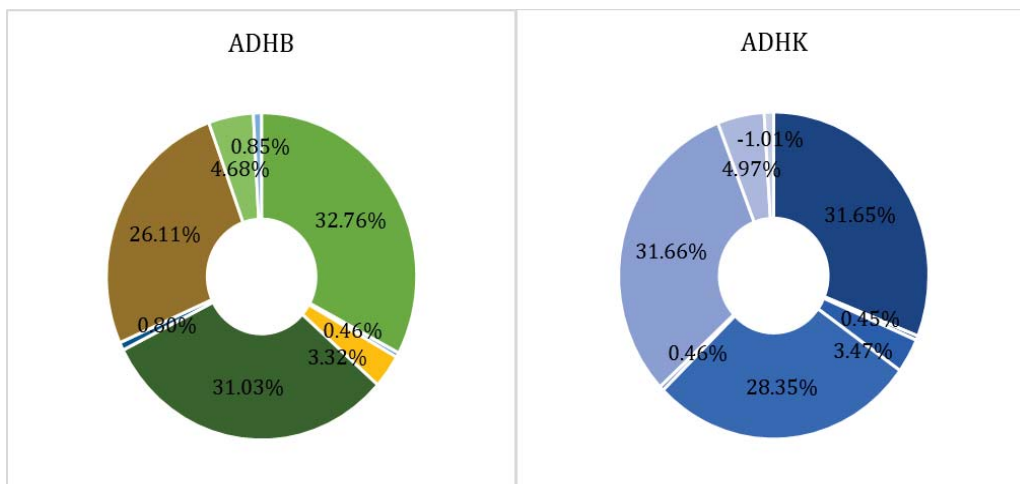
Perkembangan nilai PDRB menurut pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB juga dinilai Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan bahwa volume berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, swasta dan pemerintah mengalami peningkatan. Hal ini didasarkan bahwa PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga konstant yang meningkat dengan nilai harga dasar pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADHK, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan barang dan jasa secara volume atau secara kuantitas saja, tanpa ada pengaruh perubahan harga. Komponen PDRB pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, terutama yang berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir selama kurun waktu 2014-2018.

Berdasarkan nilai PDRB pengeluaran untuk komponen ekspor luar negeri dan impor luar negeri, masih diperoleh selisih net ekspor yang positif. Hal ini mengindikasikan bahwa arus perdagangan luar negeri di Provinsi Riau masih positif, dengan artian nilai ekspor barang dan jasa dari Riau lebih besar dari nilai impor barang dan jasa yang masih ke Riau. Kondisi ini menggambarkan bahwa perubahan pada pasar global akan ikut serta mempengaruhi kondisi perekonomian Riau. Namun tidak demikian halnya pada komponen net ekspor antar daerah yang menunjukkan bahwa perekonomian Riau lebih banyak

melakukan pembelian barang dan jasa dari luar daerah dibandingkan dengan menjual barang dan jasa dari daerah ini. Hal ini ditunjukkan oleh nilai PDRB pengeluaran atas harga konstant untuk komponen net ekspor antar daerah yang bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa secara global perekonomian Riau ditopang oleh kemampuan ekspor dari produksi barang dan jasa di daerah ini, namun pada pasar domestic Provinsi Riau memiliki ketergantungan terhadap pasokan barang dan jasa dari luar daerah atau luar provinsi.

4.2. Struktu Perekonomian menurut PDRB Pengeluaran

Secara umum struktur perekonomian Riau dari pembentukan PDRB menurut pengeluaran pada tahun 2018 atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstant didominasi oleh 3 (tiga) komponen pengeluaran, yaitu ekspor luar negeri, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto. Dengan kata lain, pembentuk perekonomian Riau dari sisi pengeluaran adalah ketiga komponen tersebut. Dari kondisi perekonomian tersebut dapat dipastikan bahwa perekonomian Riau sangat tergantung dengan kondisi pasar global. Kemampuan produksi terhadap barang dan jasa untuk tujuan pasar ekspor, seperti produk minyak sawit, pulp and paper serta minyak dan gas menjadi penentu terhadap perkembangan perekonomian Riau. Perkembangan pasar global terhadap permintaan ketiga produk tersebut menjadi faktor yang menentukan terhadap perkembangan perekonomian Riau. Kontribusi ketiga komponen tersebut membentuk nilai PDRB menurut pengeluaran Riau lebih dari 85 persen, sedangkan komponen pengeluaran lainnya hanya dalam proporsi yang sangat kecil. Bahkan pada tahun 2018, proporsi ketiga komponen tersebut membentuk PDRB harga berlaku menurut pengeluaran sebesar 89,89 persen dan sebesar 91,66 persen terhadap PDRB harga konstant menurut pengeluaran. Lebih rinci struktur perekonomian Riau dari sisi pengeluaran pada tahun 2018 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar. IV-2 Struktur PDRB Provinsi Riau menurut Pengeluaran atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan atas Dasar Harga Konstant (ADHK) Tahun 2018

Perkembangan nilai PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku dan harga konstant untuk setiap pembentuk PDRB sisi pengeluaran disajikan pada tabel berikut ini. Secara umum selama periode 2014-2018, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto memiliki kecenderungan yang terus meningkat dalam struktur perekonomian Riau dari sisi pengeluaran. Sedangkan perkembangan ekspor luar negeri mengalami fluktuasi sesuai dengan kondisi pasar global.

Berdasarkan dibawah ini, terlihat bahwa selama periode 2014-2018, produk yang dikonsumsi di wilayah domestic Provinsi Riau, antara 27-33 persen digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga. Peran ekspor yang semula sangat dominan pada perekonomian di Provinsi Riau perlahan mulai menurun, dari kontribusinya yang mencapai lebih dari 35 persen lebih pada 2014, turun hingga sekitar 26 persen pada tahun 2018. Sedangkan impor yang merupakan komponen pengurang, mempunyai peran yang relatif kecil dengan kontribusi sekitar 3-5 persen. Demikian arus perdagangan luar negeri di Provinsi Riau mengalami surplus selama periode 2014-2018.

Tabel IV-3 Distribusi PDRB Provinsi Riau Menurut Pengeluaran, 2014-2018 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstant (ADHK) (Persen) Tahun 2014-2018

No	Komponen	2014		2015		2016		2017		2018	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	26.92	28.78	31.61	30.61	32.72	31.34	33.31	31.28	32.76	31.65
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0.37	0.42	0.41	0.42	0.42	0.42	0.44	0.42	0.46	0.45
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.81	3.65	3.34	3.79	3.47	3.67	3.44	3.53	3.32	3.47
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	23.65	26.56	28.18	27.73	30.04	27.91	30.68	27.64	31.03	28.35
5	Perubahan Inventori	4.11	2.29	1.05	0.75	1.61	0.84	0.65	0.56	0.80	0.46
6	Ekspor Luar Negeri	35.80	42.78	30.17	38.08	24.18	32.32	27.11	32.42	26.11	31.66
7	Impor Luar Negeri	3.62	4.11	3.56	3.84	3.77	4.18	4.67	5.07	4.68	4.97
8	Net Ekspor Antar Daerah	2.72	(8.58)	1.68	(5.21)	3.80	(0.67)	(0.31)	(0.92)	0.85	(1.01)
Jumlah		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Sumber: BPS, 2019

Komponen net ekspor antar daerah sebagai aktivitas distribusi barang antar provinsi di Provinsi Riau memberikan kontribusi yang cukup kecil, yaitu sekitar 1-4 persen. Pada sisi lain, pengeluaran untuk investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 23-31 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa arus modal masuk untuk pembentukan investasi di Provinsi Riau cukup besar sebagai komponen pengeluaran dari sektor swasta. Sedangkan kontribusi konsumsi akhir pemerintah relatif kecil yaitu sekitar 3 persen lebih. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik di Provinsi Riau relatif kecil dalam perekonomian. Pada sisi lain, selama periode tahun 2014-2018 perdagangan internasional di Provinsi Riau yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor luar negeri menunjukkan bahwa nilai ekspor selalu lebih besar daripada nilai impor. Perdagangan internasional Provinsi Riau dalam periode tersebut selalu dalam posisi

surplus, walaupun kontribusi ekspor cenderung mengalami penurunan tiap tahun selama periode 2014-2018.

4.3. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran

Agregat ekonomi makro lain yang dapat diturunkan dari perhitungan PDRB pada sisi pengeluaran adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Laju pertumbuhan ekonomi menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau selama periode tahun 2014-2018 secara rata-rata mencapai 2,03 persen. Selama periode tersebut, pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau sangat fluktuatif. Pada tahun 2014 ekonomi Provinsi Riau tumbuh 2,71 persen. Akibat dari krisis ekonomi global, menurunnya harga-harga komoditas di pasar internasional terutama harga komoditas energi dari produk minyak dan gas dan harga komoditi produk minyak kelapa sawit mengakibatkan komponen ekspor luar negeri Provinsi Riau mengalami penurunan. Kondisi lain adalah bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015, mengakibatkan beberapa aktivitas perekonomian di Riau memburuk sehingga menekan pertumbuhan ekonomi Riau hingga 0,22 persen. Pada tahun 2016 perekonomian Provinsi Riau kembali menunjukkan *recovery* dengan mencatat pertumbuhan sebesar 2,18 persen dan pada tahun 2018 tumbuh sebesar 2,34 persen.

Selain pertumbuhan yang dirinci menurut komponen pengeluaran, juga dapat diturunkan lagi tabel sumber pertumbuhan yang menggambarkan komponen yang sangat dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan daerah. Secara umum selama dua tahun terakhir, komponen yang menjadi sumber pertumbuhan terbesar di Provinsi Riau adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sekitar dua persen. Komponen berikutnya yang juga dominan dalam menggerakkan perekonomian Provinsi Riau adalah pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Sementara itu, kontribusi ekspor luar negeri terhadap PDRB Pengeluaran semakin menurun ditandai dengan terjadinya kontraksi pertumbuhan pada komponen ini pada tahun 2015-2016, dilanjutkan tahun 2018. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi pada sisi pengeluaran, peran pengeluaran konsumsi rumah tangga semakin penting dan memberikan dampak yang semakin besar dalam perekonomian Riau. Pelaksanaan program pembangunan di daerah Riau yang ditujukan pada

peningkatan pendapatan penduduk, perbaikan pada standar upah dan perbaikan harga-harga komoditi memberikan peluang yang semakin besar kepada rumah tangga dalam meningkatkan pendapatan untuk dibelanjakan. Program pembangunan yang bertujuan pada sisi kebijakan fiskal yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta kebijakan moneter untuk mengatur tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor, dan sebagainya menjadi bahagian yang mempengaruhi perkembangan perekonomian Riau selama periode 2014-2018.

Tabel IV-4 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran (Persen) Tahun 2014-2018

No	Komponen	2014		2015		2016		2017		2018	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	14,98	7,13	12,69	5,96	8,59	5,38	7,35	4,55	5,38	3,31
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	20,83	15,44	6,66	0,29	7,11	2,65	9,58	4,56	12,87	9,25
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-3,13	-2,85	14,10	3,50	8,89	-0,20	4,75	0,67	3,37	0,44
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	17,09	1,63	14,34	4,02	11,82	3,60	7,70	3,73	8,38	4,75
5	Perubahan Inventori	-14,88	-25,09	-75,56	-67,29	60,74	14,57	-57,29	-29,52	31,20	-17,42
6	Ekspor Luar Negeri	8,74	3,55	-19,12	-11,30	-15,92	-12,65	18,23	5,06	3,21	-0,29
7	Impor Luar Negeri	-7,53	-13,31	-5,38	-6,92	10,96	11,99	30,72	27,22	7,19	0,14
8	Net Ekspor Antar Daerah	18,90	-100,39	-40,66	-39,46	136,87	-86,87	-108,54	45,61	-396,80	11,15
Jumlah		11,83	2,70	-3,92	0,22	4,43	2,18	3,39	2,68	7,16	2,34

Sumber: BPS, 2019



BAB V Basis Perekonomian Riau

5.1. Analisis Sektor Basis Perekonomian

Pembangunan ekonomi daerah Provinsi Riau merupakan proses dimana pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Provinsi Riau dan masyarakatnya harus secara bersama-sama untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah beserta masyarakat dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya. Potensi ekonomi yang ada di Provinsi Riau perlu digali dan dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk menunjang pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Salah satu cara untuk mengembangkan potensi ekonomi yang ada adalah dengan melihat sektor ekonomi yang unggul. Sektor unggulan atau basis yang dimaksudkan disini adalah memberikan kontribusi terbesar terhadap kemajuan ekonomi daerah. Untuk mendukung sektor atau kegiatan unggulan/basis perlu ada prioritas kebijakan yang akan dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan basis (*basic activities*) adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa, dan menjualnya atau memasarkan produk-produknya keluar daerah.

Sedangkan kegiatan-kegiatan ekonomi bukan basis (*non basic activities*) adalah usaha ekonomi yang menyediakan barang-barang dan jasa-jasa untuk kebutuhan masyarakat dalam wilayah ekonomi daerah yang bersangkutan saja. Kesimpulannya kegiatan-kegiatan ekonomi bukan basis tidak menghasilkan produk untuk diekspor ke luar daerahnya. Oleh karena itu, luas lingkup produksi mereka itu dan daerah pemasarannya masih bersifat lokal.

Meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi basis suatu daerah akan meningkatkan jumlah pendapatan daerah. Selanjutnya, akan meningkatkan permintaan terhadap barang jasa di daerah itu dan akan mendorong kenaikan volume kegiatan ekonomi bukan basis (*effect multiplier*). Sebaliknya, apabila terjadi penurunan jumlah kegiatan basis akan berakibat berkurangnya pendapatan yang mengalir masuk ke dalam daerah yang bersangkutan, sehingga akan terjadi penurunan permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh kegiatan bukan basis. Dalam hubungan ini kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi dalam dua golongan, yaitu: 1. Kegiatan ekonomi (industri) yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun pasar di luar daerah itu, industri ini disebut *industri basic*. 2. Kegiatan ekonomi (industri) yang hanya melayani pasar di daerah itu sendiri, industri ini disebut *industri non basic* atau industri lokal.

Teori basis ekonomi digunakan sebagai dasar pemikiran teknik *Location Quotient (LQ)* pada intinya adalah industri basis menghasilkan barang dan jasa baik untuk pasar di daerah maupun untuk pasar di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan hasil ke luar daerah itu mendatangkan arus pendapatan ke dalam daerah tersebut. Arus pendapatan menyebabkan kenaikan konsumsi maupun kenaikan investasi, dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja. Kenaikan pendapatan di daerah tidak hanya menaikkan permintaan terhadap hasil industri basis melainkan juga akan meningkatkan permintaan terhadap hasil industri lokal (*non basic*), sehingga pada akhirnya akan menaikkan investasi di daerah tersebut. Oleh karena itu, menurut teori basis ekonomi, ekspor daerah merupakan faktor penting dalam pembangunan daerah. (Azis, 1994:96). Berdasarkan gagasan ini maka orang berpendapat bahwa industri-

industri basislah yang patut dikembangkan di daerah. Ada beberapa metode yang digunakan untuk membagi daerah ke dalam kegiatan basis dan bukan basis:

1. Metode langsung

Metode ini mengukur basis dengan menggunakan survei standar dan kuesioner. Cara ini dapat menghindarkan digunakannya kesempatan kerja sebagai indikator, tetapi metode ini memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar.

2. Metode tidak langsung

Metode disini adalah metode Location Quotient (LQ). Teknik Location Quotient (LQ) diterapkan pada masing-masing industri individual di daerah yang bersangkutan (dan bangsa sebagai keseluruhan sebagai norma referensi), dan konsumen yang lebih dari satu dipergunakan sebagai petunjuk adanya kegiatan ekspor. Asumsinya adalah bahwa, jika suatu daerah lebih berspesifik dari pada bangsa yang bersangkutan dalam produksi suatu barang tertentu, maka daerah tersebut mengeksport barang sesuai dengan tingkat spesifikasinya dalam memproduksi barang tersebut. Jadi, diasumsikan bahwa spesialisasi lokal dalam memproduksi mempunyai makna ekspor lokal dari produksi surplus. Secara umum Location Quotient (LQ) dapat dirumuskan seperti berikut.

$$LQ = \frac{vi}{vt} = \frac{\frac{vi}{Vi}}{\frac{vt}{Vt}}$$

Keterangan:

vi : PDB sektor i atau PDRB Riau

Vi : Total PDB Riau atau PDRB Riau

vt : PDRB sektor i Riau atau Kabupaten/Kota

Vt : Total PDRB Riau atau Kabupaten/Kota

Kriteria yang digunakan untuk menentukan suatu sektor dalam PDRB sebagai sektor basis atau bukan sektor basis digunakan kriteria sebagai berikut:

1. Apabila $LQ > 1$ menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan basis, sehingga sektor tersebut memiliki prospek yang menguntungkan untuk dikembangkan, karena mampu mengalokasikan ke daerah lain.
2. Apabila $LQ < 1$ menunjukkan bahwa sektor tersebut non basis dan kurang menguntungkan untuk dikembangkan serta belum mampu memenuhi semua permintaan dari dalam daerah sehingga harus didatangkan dari daerah lain.

5.2. Sektor Basis Perekonomian Riau

Prospek pengembangan perekonomian daerah ditentukan dengan analisis *Static Location Quotient (LQ)* selama periode 2014-2018 Provinsi Riau terhadap PDB Nasional. Berdasarkan analisis LQ diperoleh bahwa sektor basis Provinsi Riau adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan.

Nilai PDRB pada tiga sektor basis di Riau, yaitu sektor pertanian, pertambangan dan industri pengolahan, merupakan lapangan usaha penyumbang nilai PDRB terbesar terhadap total PDRB Riau selama periode 2014-2018. Perkembangan perekonomian Riau secara umum sangat ditentukan oleh perkembangan ketiga lapangan usaha tersebut. Lesunya kondisi perekonomian pada ketiga sektor tersebut akan berdampak buruk terhadap kondisi perekonomian Riau, demikian juga sebaliknya, jika ketiga lapangan usaha tersebut pada kondisi baik maka kondisi perekonomian Riau akan membaik pula.

Jika ditelusuri lebih jauh dari nilai PDRB Riau pada masing-masing lapangan usaha dari sektor pertanian, pertambangan dan industri pengolahan, maka terlihat bahwa kontribusi masing-masing lapangan usaha tersebut cukup besar terhadap PDB Indonesia pada periode 2014-2018. Kontribusi PDRB lapangan usaha pertambangan terhadap PDB Indonesia mencapai 8 persen hingga 12 persen. Sedangkan nilai PDRB lapangan usaha pertanian Riau memberikan kontribusi sekitar 7 persen hingga 8 persen terhadap PDB Indonesia, dan nilai PDRB lapangan usaha industri pengolahan memberikan kontribusi sekitar 5 persen terhadap

nilai PDB Indonesia. Kontribusi nilai PDRB ketiga lapangan usaha di Riau tersebut memberikan arti penting dalam perekonomian nasional. Dengan kata lain, bahwa sektor pertanian, sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan Riau menjadi bahagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

**Tabel V-1 Sektor Basis dalam Perekonomian Provinsi Riau
Tahun 2014 – 2018**

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.77	1.74	1.77	1.85	1.93	1.81
B	Pertambangan dan Penggalian	2.58	3.06	3.04	2.62	2.27	2.70
C	Industri Pengolahan	1.26	1.30	1.36	1.42	1.45	1.36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19
F	Konstruksi	0.71	0.73	0.73	0.75	0.76	0.74
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	0.62	0.63	0.65	0.68	0.70	0.66
H	Transportasi dan Pergudangan	0.18	0.16	0.16	0.15	0.16	0.16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.14	0.15	0.15	0.16	0.16	0.15
J	Informasi dan Komunikasi	0.22	0.23	0.23	0.22	0.23	0.22
K	Jasa keuangan dan Asuransi	0.24	0.23	0.22	0.21	0.22	0.22
L	Real Estat	0.29	0.31	0.30	0.31	0.32	0.30
M,N	Jasa Perusahaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.45	0.46	0.45	0.46	0.46	0.45
P	Jasa Pendidikan	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.16	0.17	0.16	0.17	0.17	0.17
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.26	0.26	0.27	0.27	0.28	0.27

Sumber: BPS, 2019

5.1. Sektor Basis Perekonomian Daerah di Riau

Dengan mempergunakan metode analisis LQ terhadap PDRB Riau menurut lapangan usaha dan PDRB Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, maka dapat ditentukan sektor basis dalam perekonomian daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau. Sektor basis merupakan sektor unggulan yang memberikan sumbangan besar terhadap perekonomian daerah di Provinsi Riau. Sektor ini perlu mendapat perhatian khusus karena dapat menjadi sektor yang menggerakkan perekonomian daerah.

Berdasarkan analisis LQ pada PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, maka beberapa kabupaten/kota akan dikelompokkan dalam sektor basis atau sektor unggulan yang sama. Hasil analisis menunjukkan bahwa kabupaten yang memiliki sektor basis pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ditemukan pada 8 (delapan) kabupaten di Provinsi Riau, kecuali Kota Pekanbaru, Dumai dan Kabupaten Siak. Hal ini mengindikasikan bahwa 8 (delapan) kabupaten tersebut menjadikan sektor pertanian sebagai sektor unggulan dan merupakan sektor penting dalam mendukung perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Pada sisi lain, aktivitas ekonomi dalam lapangan usaha pertanian masih menjadi karakteristik utama perekonomian pada umumnya daerah di Provinsi Riau.

Sektor pertambangan sebagai lapangan usaha yang memberikan kontribusi besar di Riau dan merupakan sektor basis di Provinsi Riau, juga ditemukan sebagai sektor basis pada 4 (empat) kabupaten di Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Siak, Kampar, Bengkalis dan Rokan Hilir. Hal ini mengindikasikan bahwa penyumbang terbesar nilai PDRB sektor pertambangan di Riau disumbangkan oleh keempat kabupaten tersebut. Dengan kata lain, keempat kabupaten tersebut mengandalkan sektor pertambangan sebagai sektor penting dalam perekonomian dan menentukan kondisi dan perkembangan perekonomian daerah tersebut.

Pada sektor industri pengolahan ditemukan 6 (enam) kabupaten/kota yang menjadikannya sebagai sektor basis, yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Pelalawan, Siak, Kepulauan Meranti dan Kota Dumai. Secara rinci sektor basis dalam perekonomian kabupaten/kota dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel V-2 Sektor Basis dalam Perekonomian Kabupaten/Kota di
Provinsi Riau Tahun 2014 - 2018**

No	Lapangan Usaha	Kabupaten/Kota
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantan Singingi 2. Indragiri Hulu 3. Indragiri Hilir 4. Pelalawan 5. Kampar 6. Rokan Hulu 7. Rokan Hilir 8. Kepulauan Meranti
B	Pertambangan dan Penggalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siak 2. Kampar 3. Bengkalis 4. Rokan Hilir
C	Industri Pengolahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantan Singingi 2. Indragiri Hulu 3. Pelalawan 4. Siak 5. Kepulauan Meranti 6. Dumai
D	Pengadaan Listrik dan Gas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rokan Hulu 2. Pekanbaru 3. Dumai
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantan Singingi 2. Indragiri Hulu 3. Indragiri Hilir 4. Pekanbaru 5. Dumai
F	Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indragiri Hulu 2. Pekanbaru 3. Dumai
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indragiri Hulu 2. Indragiri Hilir 3. Pekanbaru 4. Dumai

No	Lapangan Usaha	Kabupaten/Kota
H	Transportasi dan Pergudangan	1. Indragiri Hulu 2. Indragiri Hilir 3. Kepulauan Meranti 4. Pekanbaru 5. Dumai
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1. Indragiri Hulu 2. Indragiri Hilir 3. Pekanbaru 4. Dumai
J	Informasi dan Komunikasi	1. Rokan Hulu 2. Pekanbaru 3. Dumai
K	Jasa keuangan dan Asuransi	1. Rokan Hulu 2. Pekanbaru 3. Dumai
L	Real Estat	1. Indragiri Hulu 2. Kampar 3. Pekanbaru
M, N	Jasa Perusahaan	1. Siak 2. Pekanbaru
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1. Kuantan Singingi 2. Indragiri Hulu 3. Indragiri Hilir 4. Rokan Hulu 5. Kepulauan Meranti 6. Pekanbaru 7. Dumai
P	Jasa Pendidikan	1. Kuantan Singingi 2. Indragiri Hulu 3. Indragiri Hilir 4. Siak 5. Kampar 6. Pekanbaru
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1. Indragiri Hulu 2. Siak

No	Lapangan Usaha	Kabupaten/Kota
		3. Rokan Hulu 4. Pekanbaru
R,S,T,U	Jasa lainnya	1. Indragiri Hulu 2. Siak 3. Pekanbaru 4. Dumai

Sumber: BPS, 2019

Selain sektor basis lainnya yang menjadi penting untuk dijelaskan diluar sektor basis yang terdapat di Riau adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang ditemukan pada kebanyakan kabupaten/kota di Riau, yaitu sebanyak 7 (tujuh) kabupaten/kota. Hal ini mengindikasikan aktivitas administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib masih menjadi unggulan dalam perkembangan perekonomian di Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Lebih rinci tentang sektor basis pada setiap lapangan usaha untuk kabupaten/kota di Provinsi Riau dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel V-3 Analisis Koefisien Location Quotient (LQ) Sektor Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2014-2018

No.	Lapangan Usaha	Hasil dari LQ Tahun 2014 - 2018											
		Kuantan Singingi	Indragiri Hulu	Indragiri Hilir	Pelalawan	Siak	Kampar	Rokan Hulu	Bengkalis	Rokan Hilir	Kep. Meranti	Pekanbaru	Dumai
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,93	1,17	1,88	1,50	0,87	1,17	2,15	0,39	1,36	1,53	0,06	0,22
B	Pertambangan dan Penggalian	0,27	0,49	0,04	0,09	1,22	1,25	0,21	2,87	1,68	0,64	0,00	0,02
C	Industri Pengolahan	1,03	1,04	0,95	1,79	1,43	0,97	0,91	0,52	0,68	1,00	0,76	1,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,66	0,87	0,77	0,47	0,13	0,85	1,24	0,35	0,39	0,62	3,64	1,32
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,57	3,93	1,14	0,52	0,32	0,44	0,55	0,98	0,59	0,38	1,40	1,21
F	Konstruksi	0,84	1,57	0,63	0,28	0,53	0,83	0,38	0,32	0,15	0,50	3,56	1,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	0,39	1,03	1,53	0,29	0,21	0,35	0,55	0,59	0,52	0,88	3,16	2,01
H	Transportasi dan Pergudangan	0,52	1,31	1,23	0,26	0,13	0,36	0,61	0,31	0,18	2,81	2,97	3,46

Analisis Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2019

Hasil dari LQ Tahun 2014 - 2018

No.	Lapangan Usaha	Kuantan Singingi	Indragiri Hulu	Indragiri Hilir	Pelalawan	Siak	Kampar	Rokan Hulu	Bengkalis	Rokan Hilir	Kep. Meranti	Pekanbaru	Dumai
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,42	1,68	1,00	0,35	0,09	0,18	0,59	0,48	0,41	0,48	3,78	1,60
J	Informasi dan Komunikasi	0,46	0,81	0,74	0,66	0,32	0,51	1,30	0,47	0,35	0,77	3,49	1,42
K	Jasa keuangan dan Asuransi	0,59	0,98	0,64	0,57	0,41	0,50	1,01	0,30	0,36	0,31	3,90	1,32
L	Real Estat	0,78	1,40	0,88	0,70	0,49	1,09	0,77	0,32	0,42	0,51	3,21	0,51
M,N	Jasa Perusahaan	0,18	0,62	0,53	0,23	1,04	0,68	0,88	0,65	0,04	0,62	3,63	0,94
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,46	1,02	1,06	0,65	0,56	0,94	1,86	0,56	0,45	1,24	2,11	1,12
P	Jasa Pendidikan	1,14	1,45	1,02	0,63	1,03	1,01	0,82	0,52	0,57	0,41	2,10	0,93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,91	1,04	0,72	0,72	1,10	0,95	1,00	0,41	0,39	0,36	2,62	0,84
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,92	1,45	0,90	0,59	1,14	0,65	0,97	0,47	0,43	0,61	2,33	1,07

5.3. Analisis Shift-Share Perekonomian Riau

Dinamika perkembangan sektor ekonomi dapat ditelaah dengan pendekatan *shift share analysis*. Analisis shift share digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi Provinsi Riau relatif terhadap struktur ekonomi Indonesia berdasarkan nilai PDRB Riau tahun 2014 dan 2018 dan PDB Indonesia tahun 2014 dan 2018. Analisis Shift Share digunakan dengan rumus berikut.

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

$$D_{ij} = PDRB_{ij}^{2018} - PDRB_{ij}^{2014}$$

$$N_{ij} = PDRB_{ij}^{2014} \times r_n$$

$$M_{ij} = PDRB_{ij}^{2014} \times (r_{in} - r_n)$$

$$C_{ij} = PDRB_{ij}^{2014} \times (r_{ij} - r_{in})$$

$$r_{ij} = \frac{(PDRB_{ij}^{2018} - PDRB_{ij}^{2014})}{PDRB_{ij}^{2014}}$$

$$r_{in} = \frac{(PDB_{in}^{2018} - PDB_{in}^{2014})}{PDB_{in}^{2014}}$$

$$r_n = \frac{(PDB_n^{2018} - PDB_n^{2014})}{PDB_n^{2014}}$$

Keterangan:

- D_{ij} : Pergeseran Bersih (*Shift Share*)
- N_{ij} : Komponen Pertumbuhan Nasional (*National Growth Effect*)
- M_{ij} : Komponen Bauran Industri atau Pertumbuhan Proporsional (*Proportional Effect*)
- C_{ij} : Komponen Keunggulan Kompetitif (*Differential Effect*)
- r_{ij} : Laju pertumbuhan sektor i pada PDRB Riau
- r_{in} : Laju pertumbuhan sektor i pada PDB Indonesia
- r_n : Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia

Berdasarkan analisis shift share seperti ditampilkan pada Tabel 5.4, nilai pergeseran bersih (Di) semua sektor bernilai positif, kecuali sektor pertambangan dan penggalian yang bernilai negatif. Hal ini memberikan indikasi bahwa perkembangan keseluruhan sektor perekonomian di Riau

tergolong progresif, kecuali sektor pertambangan selama periode 2014-2018. Dengan kata lain perubahan struktur perekonomian Riau lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan sektor-sektor tersebut pada tingkat nasional. Meskipun demikian, pergeseran sektor-sektor perekonomian di Riau dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor-sektor tersebut secara nasional. Hal ini ditunjukkan oleh nilai komponen pertumbuhan nasional (*Ni*) atau *national growth effect* pada semua lapangan usaha dalam PDRB Riau yang bernilai positif. Dengan demikian, perkembangan perekonomian Riau sangat dipengaruhi oleh kebijakan umum ekonomi nasional seperti kebijakan moneter dan fiskal antara lain kebijakan kurs mata uang domestik terhadap mata uang asing, sistem perpajakan, kebijakan subsidi dan tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap perkembangan seluruh sektor perekonomian di Provinsi Riau.

**Tabel V-4 Analisis Shift Share Perekonomian Provinsi Riau
Tahun 2014 - 2018**

Kategori	Komponen Pertumbuhan Nasional (Ni)	Komponen Pertumbuhan Proporsional (Mi)	Komponen Keunggulan Kompetitif (Ci)	Pergeseran Bersih (Di)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	41,375	(3,608)	(21,782)	15,986
B	Pertambangan dan Penggalian	44,486	(26,578)	(42,551)	(24,643)
C	Industri Pengolahan	46,693	(7,133)	(17,189)	22,371
D	Pengadaan Listrik dan Gas	83	34	(49)	68
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	23	(6)	(13)	4
F	Konstruksi	12,346	3,822	(8,175)	7,993
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	14,585	(769)	(5,971)	7,844
H	Transportasi dan Pergudangan	1,366	1,167	(1,924)	609
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	757	(192)	(271)	295
J	Informasi dan Komunikasi	1,317	455	(902)	870
K	Jasa keuangan dan Asuransi	1,612	539	(1,793)	357
L	Real Estat	1,417	(3)	(754)	660
M, N	Jasa Perusahaan	8	5	(7)	6
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,006	(335)	(2,188)	483
P	Jasa Pendidikan	778	59	(502)	336
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	285	49	(158)	175
R,S,T,U	Jasa lainnya	700	479	(494)	686
Total PDRB	170,838	(32,015)	(104,723)	34,100	

Selanjutnya komponen pertumbuhan proporsional (*Mi*) atau dikenal juga dengan *proportional shift* dalam analisis shift share diperoleh nilai yang

berbeda dalam sektor perekonomian Riau. Sektor dengan nilai PDRB Riau terbesar yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan memiliki efek negatif. Hal ini memberikan indikasi bahwa secara keseluruhan pertumbuhan sektor pertanian, sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan dalam perekonomian Riau lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor-sektor tersebut secara nasional. Beberapa hal yang dapat menyebabkan pertumbuhan sektor yang lambat adalah tingkat produktivitas sektor di Riau yang lebih rendah dari nasional atau disebabkan oleh kebijakan pembangunan daerah belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan sektor tersebut. Beberapa sektor lain yang memiliki proporsi pertumbuhan yang lebih rendah dari nasional adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor reparasi mobil dan sepeda motor, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor real estat dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

Pada sisi lain, beberapa sektor perekonomian Riau lebih baik pertumbuhannya dibandingkan dengan pertumbuhan sektor tersebut secara nasional. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan proporsional yang positif dalam sektor perekonomian Riau, seperti sektor pengadaan listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor jasa perusahaan, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan sektor jasa lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh nilai komponen pertumbuhan proporsional (M_i) sektor-sektor tersebut bernilai positif.

Komponen lain dari analisis shift share adalah komponen keunggulan kompetitif atau dikenal juga dengan *differential shift*, yang menunjukkan tingkat kompetitif sektor tersebut di Riau dibandingkan dengan perekonomian nasional. Berdasarkan analisis tersebut, semua sektor perekonomian Riau memiliki daya saing atau kompetitif yang lebih rendah dari daya saing sektor-sektor tersebut secara nasional.



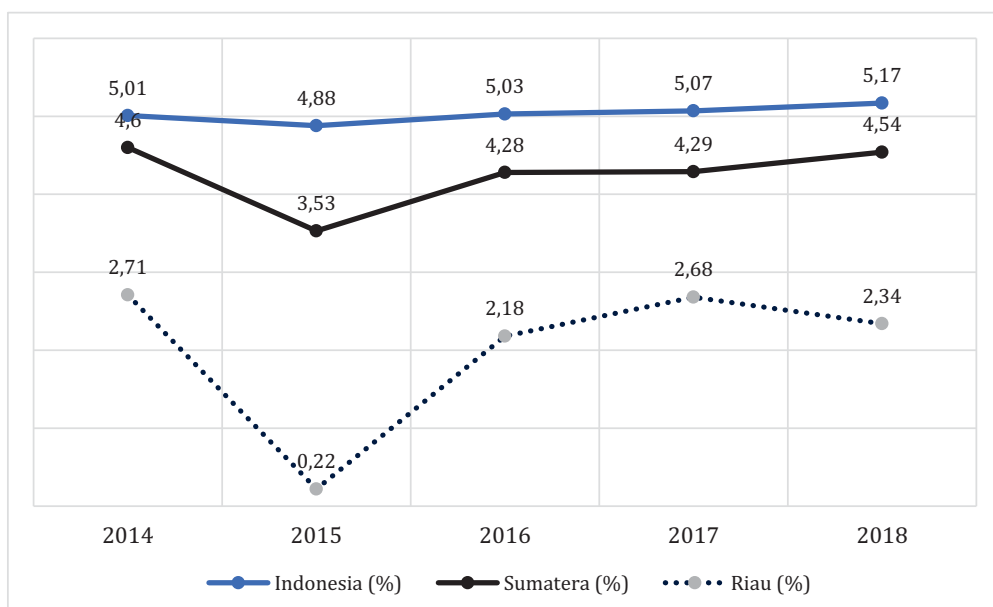
BAB VI Perbandingan Perekonomian Indonesia dan Pulau Sumatera

6.1. Perekonomian Indonesia

Secara umum, perekonomian Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan selama periode 2014-2018. Selama periode 2014-2018 perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan pada kisaran 4,88 persen hingga 5,17 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terendah terjadi pada tahun 2015. Keadaan ini juga terimbas pada perekonomian Pulau Sumatera dan Riau yang menurun. Kemudian perekonomian Indonesia terus mengalami perbaikan pada tahun 2016-2018 dan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2018, diikuti oleh perbaikan pada pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera, namun tidak demikian halnya pada pertumbuhan ekonomi Riau. Pada tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi Riau justru mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Ketergantungan perekonomian Riau dengan komoditi kelapa sawit dan migas, yang cenderung sangat dipengaruhi oleh perekonomian global, maka kondisi pasar global yang melemah akan menyebabkan perekonomian Riau melemah juga.

Secara umum pada tahun 2015, terjadi penurunan produksi pada sektor-sektor perekonomian nasional. Sektor pertambangan mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu sebesar 3,42 persen, sedangkan sektor pertanian dan industri mengalami peningkatan produksi masing-masing sebesar 3,75 persen dan 4,33 persen. Sesuai dengan karakteristik perekonomian Riau, yang masih didominasi oleh sektor pertambangan, maka kondisi ini mengakibatkan perekonomian Riau melemah pada tahun 2015. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2014, produksi sektor pertambangan Indonesia mengalami penurunan selama kurun 2015-2017 dan sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2018. Sementara itu, produksi sektor pertambangan Riau terus

mengalami penurunan. Produksi sektor pertambangan Riau diperkirakan mengalami penurunan hingga 21 persen selama periode 2014-2018. Namun dukungan sektor pertanian dan inustri yang meningkat di Riau menjadi penyebab masih terjadi pertumbuhan positif dalam perekonomian Riau selama periode 2014-2018.

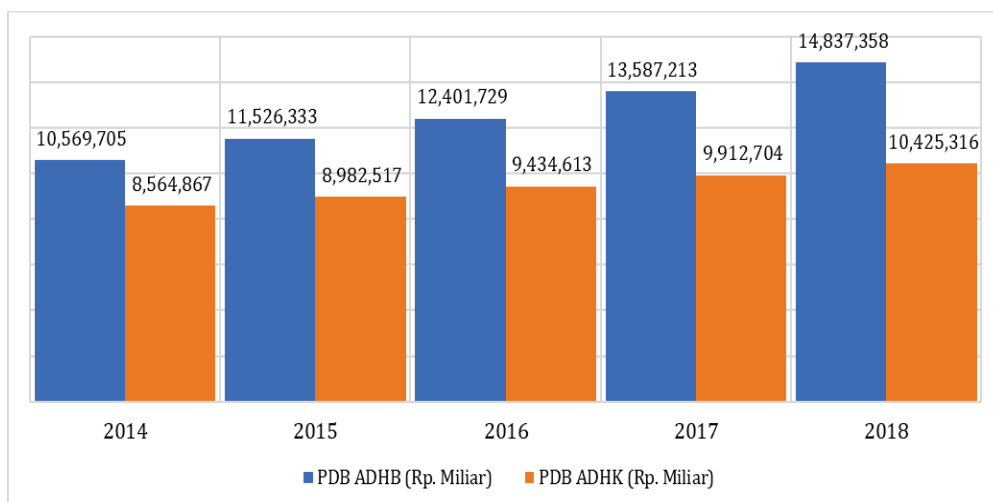


Gambar. VI-1 Perkembangan PDB Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014 - 2018

Secara nominal, nilai PDB Indonesia mengalami kenaikan selama periode 2014-2018. Kenaikan PDB Indonesia atas dasar harga berlaku sebesar 40,38 persen dari tahun 2014 Rp. 10.569,71 Triliun menjadi Rp. 14.837,36 Triliun pada tahun 2018. Sedangkan kenaikan PDB Indonesia atas dasar harga konstant sebesar 21,72 persen selama periode 2014-2018 dari Rp. 8.564,87 Triliun pada tahun 2014 menjadi Rp. 10.425,32 Triliun pada tahun 2018.

Memperhatikan perkembangan nilai PDB Indonesia atas dasar konstant tahun 2010, menunjukkan bahwa ada indikasi terjadinya kenaikan produksi barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri selama periode 2014-2018, kecuali sektor pertambangan. Kenaikan produksi barang dan jasa di dalam negeri menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mengalami perkembangan

untuk mendukung pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Penurunan produksi sektor pertambangan menunjukkan bahwa sektor ini masih tergantung dengan ketersediaan sumberdaya tambang sebagai *un-renewable resources*, dimana produksinya sangat tergantung dengan ketersediaan, kecuali ditemukan sumber-sumber tambang baru yang dapat meningkatkan produksi pertambangan. Lebih rinci, perkembangan nilai PDR Indonesia selama periode 2014-2018 disajikan pada gambar berikut.



Gambar. VI-2 Perkembangan PDB Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014 - 2018

6.2. Perekonomian Sumatera

Secara absolut nilai PDRB Provinsi Riau menempati posisi terbesar pertama dalam perekonomian Sumatera, diikuti oleh nilai perekonomian Sumatera Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi Riau merupakan daerah dengan tingkat perkembangan ekonomi terbaik secara relative dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku provinsi di Sumatera disajikan pada Tabel VI-1.

Nilai PDB Harga Berlaku Indonesia memiliki trend meningkat setiap tahun selama periode 2014-2018, dan pada akhir tahun 2018 PDB Indonesia tercatat sebesar Rp 14.837.358,- Miliar. Nilai PDB tahun 2018 naik dari tahun sebelumnya dengan total Rp 13.587.213,- Miliar. Kondisi ini juga terjadi di Pulau Sumatra, PDRB total 10 provinsi di Sumatera tumbuh dari tahun 2014

hingga 2018. Pada tahun 2014 nilai PDRB di pulau Sumatra berada pada Rp 2.458.866 Milliar dan ditahun 2018 berada pada angka Rp 3.233.250 Milliar atau PDRB Pulau Sumatra tumbuh sebesar 31 persen dengan menggunakan tahun dasar PDRB 2014. Kontribusi PDRB seluruh provinsi di Pulau Sumatra terhadap nasional sebesar 21,79 persen pada tahun 2018 dengan total nilai Rp 3.233.250,- Milliar dan PDB Nasional sebesar Rp. 14.837.358,- Miliar.

Tabel VI-1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi (Miliar rupiah), 2014-2018

Provinsi	2014	2015	2016	2017*	2018**
Aceh	127.897	129.093	136.844	145.807	155.912
Sumatera Utara	521.955	571.722	626.063	684.275	741.193
Sumatera Barat	164.944	179.952	196.099	213.890	230.529
Riau	679.396	652.762	681.699	704.798	755.274
Jambi	144.814	155.066	171.199	189.868	208.379
Sumatera Selatan	306.422	331.766	353.867	382.886	419.723
Bengkulu	45.390	50.334	55.384	60.658	66.413
Lampung	230.794	252.883	279.418	306.700	333.681
Kep. Bangka Belitung	56.374	60.987	65.048	69.861	73.069
Kep. Riau	180.880	199.570	216.008	227.763	249.077
Sumatera	2.458.866	2.584.134	2.781.629	2.986.505	3.233.250
PDRB 34 Provinsi	10.681.774	11.652.686	12.621.833	13.742.287	14.985.962
INDONESIA (PDB)/(GDP)	10.569.705	11.526.333	12.401.729	13.587.213	14.837.358

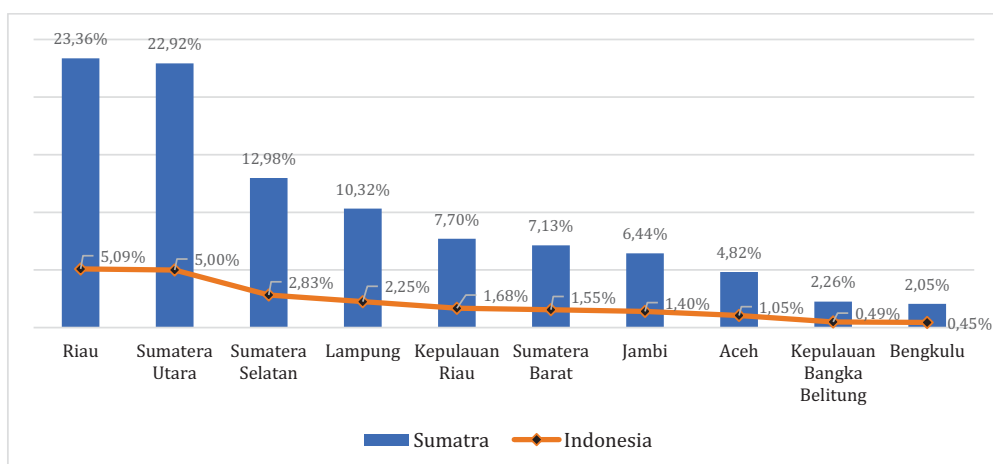
Sumber: BPS, 2019

6.3. Distribusi Perekonomian Sumatera

Pertumbuhan ekonomi akan terjadi melalui proses pembangunan suatu daerah yang diukur dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dimana PDRB tersebut merupakan ukuran yang menunjukkan *value added* produksi barang dan jasa warga masyarakat, sehingga masyarakat dapat menikmatinya dengan ketersediaan sumber-sumber input produksi seperti tenaga kerja, modal dan sumber daya alam lainnya. Pulau Sumatera memiliki tiga daerah potensi wilayah yang kaya akan sumber daya alam, yaitu Provinsi Aceh, Riau dan Sumatera Selatan. Selain dari pada itu Pulau Sumatera juga memiliki pusat perdagangan besar yang berkedudukan di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Medan Sumatera Utara.

Dari Gambar IV-3 dapat dengan jelas dilihat bahwa pada tahun 2018, Provinsi Riau masih mendominasi kontribusi tertinggi dalam perekonomian Pulau

Sumatera, yaitu sekitar 23,36 persen, dan berkontribusi sekitar 5,09 persen terhadap perekonomian Nasional. Kemudian disusul oleh Provinsi Sumatera Utara dengan share sekitar 22,92 persen, Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah kontribusi PDRB sekitar 12,98 persen, Lampung menyumbang kontribusi sebesar 10,32 persen sedangkan Sumatera Barat dan Kepulauan Riau masing-masing sekitar 7,00 persen. Lainhalnya dengan Provinsi Aceh yang merupakan salah satu dari tiga provinsi yang memiliki kekayaan alam yang melimpah di Pulau Sumatera namun hanya bisa berkontribusi PDRB sekitar 4,82 persen terhadap perekonomian Pulau Sumatera dan 1,40 persen terhadap perekonomian Nasional. Sedangkan Provinsi Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung memberika kontribusi terkecil terhadap perekonomian Pulau Sumatera, yaitu sekitar 2,00 persen.



Gambar. VI-3 Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Pulau Sumatera menurut Provinsi Tahun 2018 (Persen)

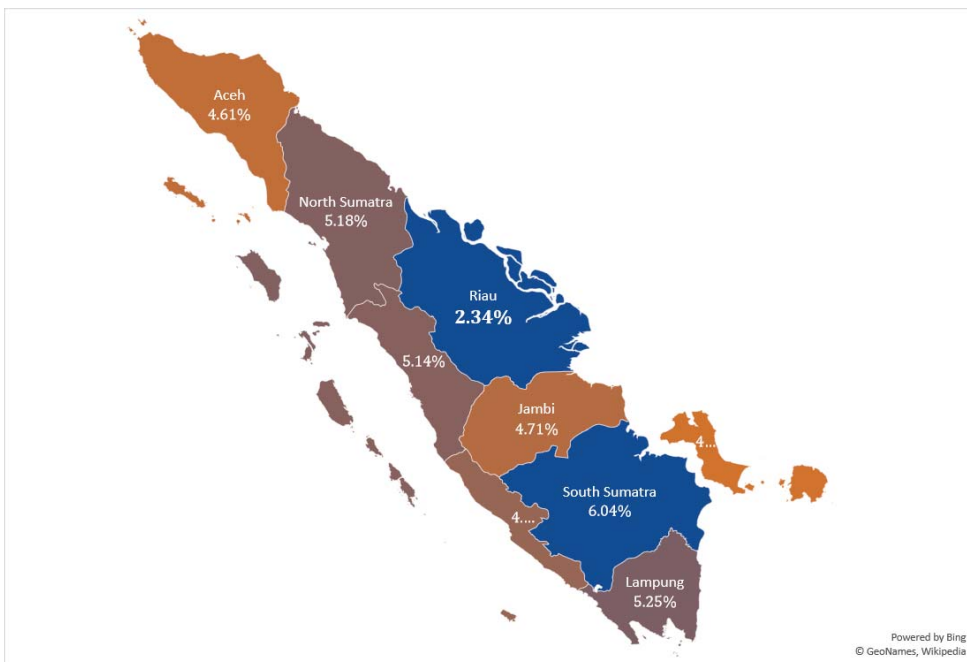
6.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera

Walaupun kontribusi nilai PDRB Riau paling besar terhadap total nilai PDRB seluruh provinsi seluruh Sumatera pada tahun 2018, namun pertumbuhan ekonomi Riau paling rendah diantara pertumbuhan ekonomi provinsi lain di Sumatera. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Riau berdasarkan harga berlaku sebesar 2,34 persen dan lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi Sumatera sebesar 4,54 persen dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar

Analisis Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2019

5,17 persen. Provinsi Sumatera Utara dengan nilai PDRB yang terbesar kedua di Sumatera memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 5,18 persen, dan Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai PDRB terbesar ketiga di Sumatera memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 6,04 persen.

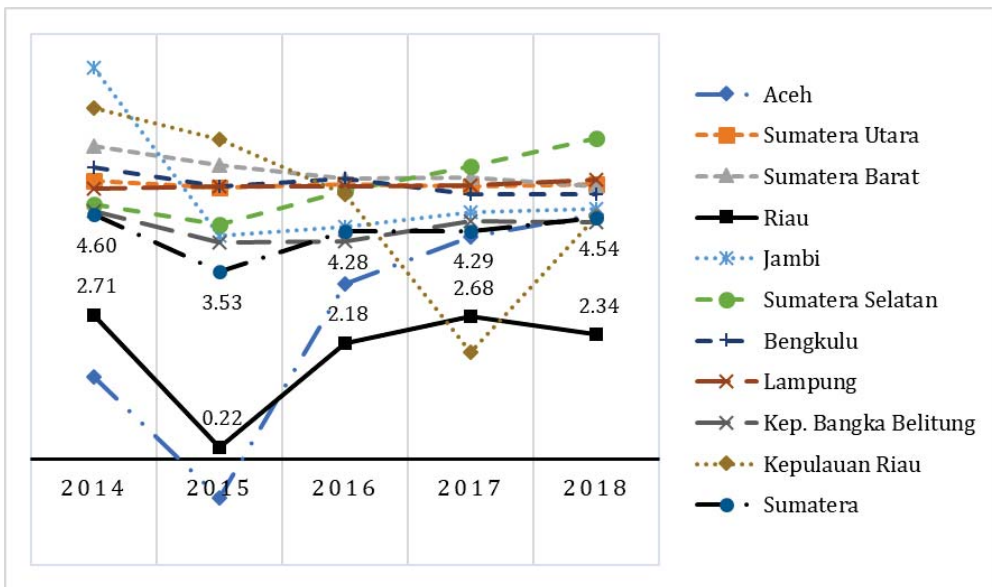
Meskipun nilai PDRB Riau atas dasar harga berlaku adalah yang terbesar di antara provinsi lain di Pulau Sumatera, namun sangat rentan terhadap perubahan iklim pasar global. Hal ini disebabkan oleh sektor pembentuk perekonomian Riau sangat tergantung dengan kondisi dan perkembangan pasar global, baik pada sektor pertanian, pertambangan dan industri pengolahan. Produk-produk yang dihasilkan pada tiga sektor andalan Riau memiliki ketergantungan yang besar terhadap dinamika perkembangan pasar global. Lebih jelas perbandingan pertumbuhan ekonomi Riau di Pulau Sumatera dalam dilihat pada gambar berikut.



Gambar. VI-4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi di Sumatera Tahun 2018 (Persen)

Perbandingan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Riau berdasarkan harga berlaku diantara provinsi lain di Pulau Sumatera dapat dilihat pada Gambar VI-5. Pada tahun 2014, laju pertumbuhan ekonomi Riau berada

nomor dua terkecil diantara provinsi lain di Pulau Sumatera, setelah Provinsi Aceh, yaitu sebesar 2,71 persen. Kemudian pada tahun 2015, laju pertumbuhan ekonomi Riau semakin menurun hingga pada level 0,22 persen dan berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh (-0,37 persen). Namun mulai tahun 2016 hingga tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi Riau berada dibawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Riau sebesar 2,68 persen dan sedikit berada diatas pertumbuhan ekonomi provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 2,00 persen.

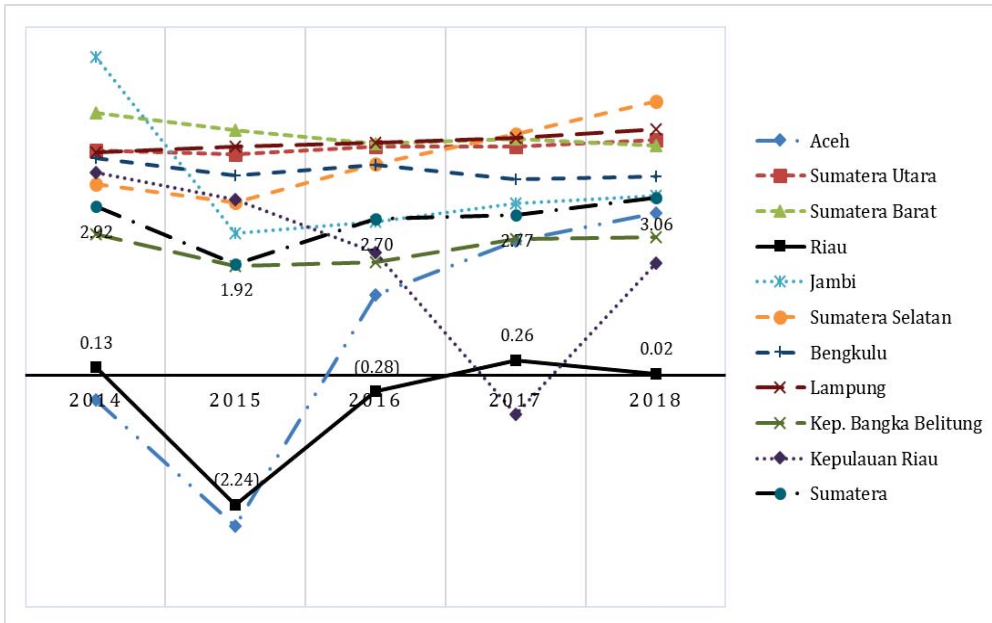


Gambar. VI-5 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekomi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Antar Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2014-2018 (Persen)

Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi Riau atas dasar harga konstant pada tahun 2018 sebesar 0,02 persen dan jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi provinsi lain di Pulau Sumatera merupakan laju pertumbuhan ekonomi terendah pada tahun 2018. Sementara itu, pada tahun 2014, laju pertumbuhan ekonomi Riau adalah sebesar 0,13 persen dan jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi provinsi lain di Pulau Sumatera, Riau merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terendah kedua setelah provinsi Aceh, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar -0,43 persen.

Analisis Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2019

Pada tahun 2015, ada titik nadir laju pertumbuhan ekonomi Riau atas dasar harga konstant tahun 2010 yang terendah yaitu sebesar - 2,24 persen, dan jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi provinsi lain di Pulau Sumatera, Provinsi Riau merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terendah kedua setelah provinsi Aceh, yaitu sebesar - 2,61 persen.



Gambar. VI-6 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekomi Atas Dasar Harga Konstant (ADHK) Antar Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2014-2018 (Persen)

Pada tahun 2016, laju pertumbuhan ekonomi Riau atas dasar harga kostant paling rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi provinsi lain di Pulau Sumatera, Riau merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terendah. Kemudian pada tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi Riau sedikit mengalami peningkatan dan menempati posisi laju pertumbuhan ekonomi terendah kedua jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi provinsi lain di Pulau Sumatera, setelah Provinsi Kepulauan Riau, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar -0,67 persen. Lebih rinci perbandingan laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstant provinsi-provinsi di Pulau Sumatera disajikan pada Gambar VI-6.



BAB VII Kesimpulan dan Rekomendasi

7.1. Kesimpulan

1. Laju pertumbuhan ekonomi menurut harga berlaku selama periode tahun 2014 -2018 menunjukkan trend yang menurun dari 11,83 persen pada tahun 2014 menjadi 7,16 persen pada tahun 2018. Laju pertumbuhan ekonomi terburuk terjadi pada tahun 2015 dengan laju pertumbuhan ekonomi 3,92 persen dibawah nol atau mengalami pertumbuhan negatif.
2. Laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstant selama periode 2014-2018 masih berada pada pertumbuhan yang positif, walaupun masih mengalami fluktuasi. Kecenderungan laju pertumbuhan ekonomi Riau berdasarkan harga konstant adalah meningkat, Laju pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 0,22 persen, dan kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 2,18 persen dan terus meningkat menjadi 2,68 persen pada tahun 2017 dan sedikit mengalami penurunan menjadi 2,34 persen pada tahun 2018.
3. Struktur perekonomian Provinsi Riau dibentuk oleh lapangan usaha pertambangan, industri pengolahan dan pertanian dengan sumbangan sekitar 75 persen terhadap total nilai PDRB Riau pada tahun 2018 Atas Dasar Harga Berlaku. Kemudian lapangan usaha dengan nilai produksi paling kecil adalah lapangan usaha jasa perusahaan, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan pengadaan listrik dan gas.
4. Kontribusi sektor pertambangan semakin menurun perannya terhadap perekonomian Riau, sedangkan sektor pertanian dan industri pengolahan semakin besar perannya terhadap struktur perekonomian Riau. Laju pertumbuhan sektor pertambangan mengalami kontraksi yang cukup

jauh dibawah nol atau dengan pertumbuhan yang negatif hingga minus 24,93 persen pada tahun 2015 menurut harga berlaku dan sebesar 6,95 persen berdasar harga konstant tahun 2010.

5. Lapangan usaha yang menunjukkan perkembangan yang cukup baik, walaupun kontribusinya masih cukup kecil terhadap struktur perekonomian Riau adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan.
6. Perekonomian Riau dari sisi pengeluaran dalam perhitungan PDRB selama periode 2014-2018 cenderung mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstant. Nilai PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar 13,77 persen selama periode 2014-2018, yaitu dari Rp. 732,36 Triliun menjadi 833,18 Triliun. Sedangkan nilai PDRB pengeluaran atas dasar harga konstant mengalami peningkatan sebesar 9,68 persen, yaitu dari Rp. 488,08 Triliun menjadi Rp. 535,34 Triliun.
7. Karakteristik perekonomian Riau menurut pengeluaran dibentuk oleh tiga komponen pengeluaran utama, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto dan ekspor luar negeri.
8. Perekonomian Riau sangat tergantung dengan faktor eksternal, yaitu dinamika perekonomian global. Proporsi ekspor luar negeri terhadap pembentukan nilai PDRB pengeluaran Riau berdasarkan harga berlaku sebesar 35,80 persen pada tahun 2014 dan menurun menjadi 26,11 persen pada tahun 2018. Pergeseran kondisi perekonomian Riau terjadi menurut sumber pengeluaran menjadi didominasi oleh proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2018, dengan proporsi sebesar 32,76 persen terhadap total PDRB pengeluaran atas dasar harga berlaku, dari sebelumnya 26,92 persen pada tahun 2014. Sedangkan menurut PDRB pengeluaran atas dasar konstant, karakteristik perekonomian Riau lebih dominan ditentukan oleh ekspor luar negeri.
9. Berdasarkan analisis LQ diperoleh bahwa sektor basis Provinsi Riau adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan pengalihan, dan sektor industri pengolahan. Ketiga sektor merupakan

lapangan usaha penyumbang nilai PDRB terbesar terhadap total PDRB Riau selama periode 2014-2018. Perkembangan perekonomian Riau secara umum sangat ditentukan oleh perkembangan ketiga lapangan usaha tersebut.

10. Kabupaten yang memiliki sektor basis pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ditemukan pada 8 (delapan) kabupaten di Provinsi Riau, kecuali Kota Pekanbaru, Dumai dan Kabupaten Siak. Sektor pertambangan sebagai lapangan usaha yang memberikan kontribusi besar di Riau dan merupakan sektor basis di Provinsi Riau, juga ditemukan sebagai sektor basis pada 4 (empat) kabupaten di Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Siak, Kampar, Bengkalis dan Rokan Hilir. Sektor industri pengolahan ditemukan 6 (enam) kabupaten/kota yang menjadikannya sebagai sektor basis, yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Pelalawan, Siak, Kepulauan Meranti dan Kota Dumai.
11. Nilai pergeseran bersih semua sektor bernilai positif, kecuali sektor pertambangan dan penggalian yang bernilai negatif. Hal ini memberikan indikasi bahwa perkembangan keseluruhan sektor perekonomian di Riau tergolong progresif, kecuali sektor pertambangan selama periode 2014-2018. Perubahan struktur perekonomian Riau lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan sektor-sektor tersebut pada tingkat nasional. Meskipun demikian, pergeseran sektor-sektor perekonomian di Riau dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor-sektor tersebut secara nasional. Secara keseluruhan pertumbuhan sektor pertanian, sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan dalam perekonomian Riau lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor-sektor tersebut secara nasional.
12. Beberapa sektor perekonomian Riau lebih baik pertumbuhannya dibandingkan dengan pertumbuhan sektor tersebut secara nasional, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan proposional yang positif dalam sektor perekonomian Riau, adalah sektor pengadaan listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor jasa perusahaan, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan sektor jasa lainnya.

13. Berdasarkan analisis *differential shift* yang menunjukkan tingkat kompetitif sektor tersebut di Riau dibandingkan dengan perekonomian nasional, menunjukkan bahwa semua sektor perekonomian Riau memiliki daya saing atau kompetitif yang lebih rendah dari daya saing sektor-sektor tersebut secara nasional.
14. Secara absolut nilai PDRB Provinsi Riau menempati posisi terbesar pertama dalam perekonomian Sumatera. Provinsi Riau masih mendominasi kontribusi tertinggi dalam perekonomian Pulau Sumatera, yaitu sekitar 23,36 persen, dan berkontribusi sekitar 5,09 persen terhadap perekonomian Nasional. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Riau berdasarkan harga berlaku sebesar 2,34 persen dan lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi Sumatera sebesar 4,54 persen dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,17 persen.

7.2. Rekomendasi

1. Pengembangan sektor pertanian yang terintegrasi dengan sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan sektor jasa perlu menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan Riau. Hal ini didasarkan pada menurunnya peran sektor pertambangan dalam perekonomian Riau. Selain itu kewenangan dan kebijakan pemerintah daerah sangat terbatas dalam pembangunan sektor pertambangan.
2. Dominasi sub sektor perkebunan dalam perekonomian sektor pertanian di Riau (*share* sebesar 88 persen terhadap nilai PDRB atas dasar konstant sektor pertanian) perlu menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan pertanian di Riau dengan memberikan keseimbangan pada pembangunan sub sektor pertanian lainnya, khususnya sub sektor tanaman pangan, sub sektor tanaman hortikultura dan sub sektor perikanan dan peternakan yang perannya juga sangat penting dalam pembangunan ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Riau.
3. Pengembangan sektor yang memberikan daya saing yang lebih kompetitif di Riau dibandingkan dengan nasional perlu menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan ekonomi Riau, antara lain sektor pengadaan listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan,

sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor jasa perusahaan, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan sektor jasa lainnya.

4. Sektor basis dapat menjadi acuan pada ketersediaan sumberdaya ekonomi secara lokal yang memerlukan dukungan kebijakan pemerintah daerah. Kebijakan pembangunan ekonomi dalam mendukung sektor basis pada setiap kabupaten di Riau sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan perkembangan ekonomi Riau dimasa mendatang.
5. Pengembangan sumberdaya manusia dan tenaga kerja pada setiap daerah dan di Riau secara umum harus menjadi perhatian dalam pembangunan ekonomi daerah. Hal ini dimaksudkan agar perkembangan ekonomi yang dihasilkan memberikan manfaat terhadap peningkatan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran di Riau. Kebijakan bidang pendidikan dan ketenagakerjaan harus memiliki keterkaitan yang kuat dengan kebijakan pembangunan ekonomi di Riau.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik (2019). **Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Provinsi Di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2014-2018**. Tersedia di: <https://www.bps.go.id/publication/2019/07/26/dc449d34a26ec840acb305a9/p-rodruk-domestik-regional-bruto-provinsi-provinsi-di-indonesia-menurut-lapangan-usaha-2014-2018.html>, diakses pada Oktober 2019

Badan Pusat Statistik (2019). **Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (Persen), 2010 – 2018**. Tersedia di: <https://riau.bps.go.id/dynamictable/2019/07/31/75/distribusi-pdrb-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-kabupaten-kota-d-provinsi-riau-persen-2010---2018.html>, diakses pada September 2019

Badan Pusat Statistik (2015) Sosialisasi Perubahan Tahun dasar PDRB Berbasis SNA 2008. Tersedia di: <https://bps.go.id/news/2015/10/28/4/sosialisasi-perubahan-tahun-dasar-pdrb-berbasis-sna-2008.html> diakses pada September 2019